



**PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
PADA TAHUN 2014-2023**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

OLEH

MULYA RAMADHANI
NIM : 2130402057

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2025M/1447H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulya Ramadhani

NIM : 2130402057

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul "**Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2014-2023**" merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,



Mulya Ramadhani
NIM. 2130402057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Mulya Ramadhani**, NIM 2130402057 dengan judul "**Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2014-2023**" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi,
Ekonomi Syariah



Dr. Novia Nengsih, M.A.Ek., CIFA
NIP. 199011042019032008

Batusangkar, Juli 2025
Pembimbing



Lili Ramadhani, ME
NIP. 198605192020122009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Mulya Ramadhani NIM 2130402057** judul: **“Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2014-2023”** telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Kamis, 14 Agustus 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Lili Ramahdani, M.E NIP. 198605192020122009	Ketua Sidang/ Pembimbing		21/08-2025
2.	Dr.H.Rizal Fahlefi, S.Ag, M.SI NIP. 197306292001121002	Penguji 1		21/08-2025
3.	Dr.Novia Nengsih, M.A.Ek NIP.199011042019032008	Penguji 2		10/8 25

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Mulya Ramadhani Nim 2130402057 Judul Skripsi “**Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Ekonomi di Indonesia Tahun 2014-2023**”. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pemasalahan dalam penelitian ini adalah investasi mengalami kenaikan namun tidak diiringi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, namun pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang di harapkan, dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di tahun-tahun tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2014-2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menganalisis data tahunan dari 2014 hingga 2023.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menganalisis data tahunan dari 2014 hingga 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data investasi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan investasi dan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan informasi tentang pentingnya investasi dan pengeluaran pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci : Investasi, Pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

Mulya Ramadhani Student ID 2130402057 Thesis Title: "The Effect of Investment and Government Expenditure on Economic Income in Indonesia 2014-2023." Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Mahmud Yunus State Islamic University (UIN) Batusangkar.

The problem in this research is that investment has increased but is not accompanied by an increase in economic growth, government spending has increased, but economic growth has not met expectations, and economic growth has declined in certain years.

This study aims to analyze the effect of investment and government spending on economic growth in Indonesia from 2014-2023. This study uses multiple linear regression analysis to analyze annual data from 2014 to 2023.

The main objective of this study is to determine whether investment and government spending have a significant influence on economic growth in Indonesia. This study also aims to determine the extent of the influence of investment and government spending on economic growth in Indonesia.

This study also uses multiple linear regression analysis to analyze annual data from 2014 to 2023. The data used in this study are investment, government spending, and economic growth in Indonesia. The results show that investment and government spending have a significant influence on economic growth in Indonesia. This study found that increased investment and government spending can boost economic growth in Indonesia.

This study concludes that investment and government spending play a significant role in increasing economic growth in Indonesia. Therefore, the government can use this research result as a reference for formulating appropriate policies to boost economic growth in Indonesia. Thus, this study provides information on the importance of investment and government spending for economic growth in Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	13
G. Defenisi Operasional	14
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	16
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	16
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	20
3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekononi	23
B. Pengertian Investasi	24
1. Pengertian Investasi	24
2. Teori Investasi.....	28
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi	29
4. Jenis-Jenis Investasi	32
C. Pengertian Pengeluaran Pemerintah	32
1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah	32

2. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	34
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah.....	38
D. Hubungan Antara Variabel.....	44
E. Penelitian Yang Relevan	44
F. Kerangka Berfikir	47
G. Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian Kuantitatif.....	48
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Indonesia	54
1. Gambaran Umum Letak dan Kondisi Geografis Indonesia	61
2. Kondisi Iklim	62
3. Lambang Negara Indonesia	63
B. Uji Analisis Data dan Pembahasan.....	63
1. Analisis Data.....	63
2. Teknik analisis regresi linear berganda	67
3. Uji Koefisien Determinasi.....	68
4. Uji Hipotesis	69
C. Pembahasan Penelitian.....	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Indonesia tahun 2014-2023	10
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	48
Tabel 4. 1 Hasil Uji Normalitas	64
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinieritas	66
Tabel 4. 3 Hasil Uji AutoKorelasi.....	66
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	67
Tabel 4. 5 Hasil Uji Koefesien Determinasi	68
Tabel 4. 6 Uji Parsial (Uji Statistik-t)	69
Tabel 4. 7 Hasil Uji Simultan Statistik F	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	47
Gambar 4. 1 Peta Indonesia	61
Gambar 4. 2 Lambang Negara Indonesia.....	63
Gambar 4. 3 Uji Heterokedasitas	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan kondisi keuangan dan ekonomi yang dialami oleh negara tersebut dari waktu ke waktu. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi menggambarkan proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus menuju kondisi yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian, yang terlihat dari naiknya pendapatan nasional. Di tengah arus globalisasi, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai cerminan keberhasilan pembangunan nasional dan menjadi salah satu ukuran utama dalam menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Tidak dapat disangkal bahwa tingkat kesejahteraan sebuah negara sangat bergantung pada kemampuannya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada aktivitas dalam sistem perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa oleh masyarakat, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai dari barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional mencakup hanya yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Isu pertumbuhan ekonomi umumnya dipandang sebagai permasalahan jangka panjang dalam bidang ekonomi. Dari waktu ke waktu, kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena faktor-faktor produksi secara konsisten mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Di Indonesia, sektor pemerintah memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi nasional. Peran ini diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mencapai sasaran utama pembangunan,

seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurunkan tingkat pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia berfokus pada dua instrumen utama, yaitu sistem perpajakan dan belanja negara. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Sebagai proses peningkatan output secara berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai kemajuan pembangunan. Namun, jika pertumbuhan berlangsung pesat tanpa disertai pemerataan distribusi pendapatan, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, karena peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja, produktivitas, dan pemerataan pendapatan sangat bergantung pada kemajuan ekonomi. Pertumbuhan ini dapat diukur melalui peningkatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Sebagai negara yang tengah berada dalam proses pembangunan, Indonesia tidak terlepas dari tantangan dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan matang, yang menjadi target utama baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Salah satu wujud dari pertumbuhan ini terlihat pada sektor perbankan, di mana fluktuasi pertumbuhan ekonomi turut memengaruhi kestabilan ekonomi nasional, sehingga mendorong sektor perbankan untuk bersiap dalam menjaga stabilitas tersebut. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kinerja berbagai sektor ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi mencerminkan efektivitas pemerintah dalam menghadapi persoalan-persoalan utama seperti kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, setiap negara berusaha mendorong pembangunan ekonominya sebagai langkah strategis menuju tercapainya kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga merupakan alat

penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan secara menyeluruh (Ivonia dkk, 2024).

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemajuan dalam sistem perekonomian suatu negara, karena tingkat pertumbuhan tersebut merepresentasikan kondisi ekonomi negara yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Proses ini menggambarkan perubahan yang berlangsung secara terus-menerus menuju kondisi yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Indikasi pertumbuhan tersebut terlihat dari peningkatan berkelanjutan dalam ketersediaan barang, kemajuan teknologi yang berperan dalam meningkatkan kemampuan produksi berbagai barang bagi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi secara luas dan efisien.

Pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran atas perkembangan ekonomi suatu negara, karena besarnya tingkat pertumbuhan mencerminkan keadaan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ini dipandang sebagai salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan proses perubahan yang berlangsung secara konsisten menuju kondisi yang lebih baik selama periode tertentu. Tanda-tanda pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya ketersediaan barang secara berkesinambungan, kemajuan teknologi yang mendorong peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta penggunaan teknologi yang semakin luas dan efisien.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami perjalanan yang dinamis dari 2014 hingga 2023, dengan pencapaian dan tantangan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pemulihan setelah dampak pandemi, tetapi inflasi dan kemiskinan masih menjadi isu yang perlu ditangani. Selain pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia pengeluaran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah adalah suatu produk yang dihasilkan yang

memuat pilihan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dari kebijakan fiskal, yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui penetapan jumlah pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Kebijakan ini tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wilayah atau daerah. Contoh bentuk pengeluaran pemerintah antara lain belanja negara, pemberian subsidi, dan pembangunan infrastruktur (Ivonia dkk,2024).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan indikator penting yang mencerminkan situasi keuangan dan kondisi ekonomi yang dialami oleh negara tersebut dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan proses perubahan yang berlangsung secara berkelanjutan menuju kondisi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian, yang tercermin melalui naiknya pendapatan nasional. Di era globalisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai tanda keberhasilan pembangunan, serta menjadi salah satu ukuran utama untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu negara.

Tidak dapat disangkal bahwa tingkat kesejahteraan suatu negara sangat bergantung pada kemampuannya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara yang sedang dalam tahap pembangunan, juga menghadapi tantangan ini. Berbagai upaya telah ditetapkan, khususnya oleh pemerintah, guna membangun sistem ekonomi yang lebih stabil dan matang. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup dinamis. Salah satu cerminan dari pertumbuhan tersebut terlihat pada sektor perbankan, di mana fluktuasi pertumbuhan ekonomi berdampak pada stabilitas nasional dan mendorong lembaga perbankan untuk mengambil langkah antisipatif dalam menjaga kestabilan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta performa sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menangani berbagai masalah, seperti pengangguran dan kemiskinan. Setiap negara berusaha mendorong pembangunan ekonominya sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berperan sebagai tujuan akhir, tetapi juga menjadi alat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemajuan ekonomi suatu negara, karena tingkat pertumbuhannya menunjukkan bagaimana kondisi perekonomian negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga dianggap sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu negara menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini terlihat dari peningkatan yang berkelanjutan dalam ketersediaan barang, kemajuan teknologi yang turut mendorong peningkatan kapasitas dalam menyediakan berbagai jenis barang bagi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi yang semakin luas dan efisien. Pemerintah di berbagai negara menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai elemen krusial dalam menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan kondisi ekonomi yang lebih kuat dan berkembang. Beberapa faktor yang memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain adalah investasi, tenaga kerja, dan belanja pemerintah.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dipacu oleh meningkatnya investasi, pulihnya konsumsi rumah tangga, serta bertambahnya belanja pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Selain

itu, perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif terhadap kemajuan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian, yang tercermin melalui kenaikan pendapatan nasional. Analisis terhadap struktur ekonomi suatu daerah atau negara dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan (basis) dan pendukung (non-basis) yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional.

Belanja pemerintah yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Beberapa teori menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, pengeluaran untuk infrastruktur dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak investasi. Pengeluaran pemerintah dapat membuat permintaan agregat melalui program-program sosial dan pembangunan infrastruktur. Ketika pemerintah meningkatkan belanja, hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu elemen dari kebijakan fiskal, yaitu langkah yang diambil pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui penetapan jumlah penerimaan dan belanja negara setiap tahunnya. Kebijakan ini tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat daerah. Tujuan utama dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan output, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pengeluaran pemerintah atau belanja publik merujuk pada dana yang dikeluarkan dari kas negara guna membiayai berbagai kegiatan pemerintahan atau keperluan lain yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika pemerintah memutuskan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran yang dilakukan mencerminkan biaya yang diperlukan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Wagner mengemukakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Produk Nasional Bruto (GNP) cenderung meningkat, berdasarkan pengamatannya terhadap negara-negara seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19. Menurut Hukum Wagner, "Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat." Peningkatan peran pemerintah ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengelola berbagai hubungan sosial yang berkembang, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, kebudayaan, rekreasi, dan aspek lainnya dalam masyarakat.

Peacock dan Wiseman turut mengemukakan teori mengenai pengeluaran pemerintah, yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki batas toleransi terhadap pajak, yaitu sejauh mana masyarakat dapat menerima dan memahami besarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan penerimaan pajak meningkat, meskipun tarif pajak tetap, karena basis pajaknya ikut membesar. Peningkatan penerimaan pajak ini kemudian mendorong naiknya pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, semakin besar Produk Nasional Bruto (GNP), maka semakin besar pula pendapatan pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya belanja negara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan negara, maka pengeluaran negara pun cenderung ikut meningkat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta segala hal, baik berupa uang maupun barang, yang dapat menjadi milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Istilah pemerintah merujuk pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran negara adalah dana yang dikeluarkan dari

kas negara, sedangkan pengeluaran daerah berasal dari kas daerah. Sementara itu, pembiayaan diartikan sebagai setiap penerimaan yang harus dikembalikan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbagai faktor dapat memengaruhi naik turunnya tingkat pengeluaran pemerintah di setiap daerah, antara lain meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan publik, bertambahnya penyediaan layanan oleh pihak penerima manfaat, serta menurunnya efisiensi dalam pemberian layanan tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperoleh pendapatan yang memadai sebagai dasar dalam menentukan besaran pengeluaran negara. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pemerintah menetapkan asumsi-asumsi makroekonomi secara hati-hati dan penuh ketelitian.

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi. Pembangunan jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lainnya dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat serta pelaku usaha. Sebagai ilustrasi, alokasi dana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil dapat menciptakan peluang investasi swasta dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Pengeluaran pemerintah, yang merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal, diharapkan mampu merangsang aktivitas ekonomi dan memperkuat laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran ini dengan meningkatkan proporsi pengeluaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, seiring dengan naiknya PDB, pengeluaran pemerintah pun cenderung ikut meningkat. Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi tercermin dari pengeluaran di sektor

ekonomi yang secara persentase terhadap total pengeluaran menunjukkan tren kenaikan dari waktu ke waktu (Yuliana Eliza, 2015).

Selain belanja pemerintah, investasi juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman sejumlah dana dengan tujuan memperoleh keuntungan atau nilai tambah di masa mendatang. Menurut Lypsey, investasi adalah pengeluaran untuk barang-barang yang tidak langsung dikonsumsi saat ini. Berdasarkan jangka waktunya, investasi dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada dasarnya, investasi merupakan bentuk komitmen penempatan dana dalam periode tertentu dengan harapan memperoleh pendapatan sebagai bentuk imbal hasil di masa depan (Yosie, 2012).

Secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai aktivitas penanaman modal atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya, investasi merupakan bentuk komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana atau sumber daya pada waktu sekarang dengan harapan mendapatkan imbal hasil di masa mendatang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang melekat dalam kehidupan manusia, sejalan dengan konsep manusia sebagai makhluk ekonomi atau *homo economicus*.

Selain itu investasi dapat berupa pembangunan pabrik, pembelian mesin, atau pengembangan teknologi baru. Ketika sektor swasta berinvestasi, hal ini tidak hanya meningkatkan output ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terciptanya lapangan pekerjaan di suatu daerah atau negara. Namun, dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu langsung terlihat. Misalnya, di beberapa daerah seperti Provinsi Jambi, meskipun terdapat peningkatan investasi, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan investasi sangat bergantung pada kondisi lokal dan dukungan dari kebijakan pemerintah.

Naik turunnya investasi asing langsung di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang dilihat investor karena menunjukkan pergerakan perekonomian negara tersebut. Jika di suatu negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik maka investasi di negara tersebut akan mengalami peningkatan, ini disebabkan oleh negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi akan menjamin pengembalian modal bagi investor asing. Oleh karena itu, investor akan lebih memilih berinvestasi di negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi,

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan investasi dilakukan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, beserta pengeluaran pemerintah dan dampak investasi selama periode 2014 hingga 2023, ditampilkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1
Data Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi
Indonesia tahun 2014-2023
(Persen Dan Jutaan)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pengeluaran Pemerintah (Jutaan)	Investasi (Milyaran Rupiah)
2014	4,917	3,450	4,500
2015	4,892	3,676	5,283
2016	5,062	4,036	6,417
2017	5,098	4,682	7,848
2018	5,152	4,907	9,715
2019	3,445	5,198	1,109
2020	-2,761	5,274	1,175
2021	1,522	5,194	1,314
2022	4,982	4,948	1,647
2023	-4,255	5,096	2,002

Sumber : www.indonesia.bps.go.id.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penting yang menggambarkan dinamika perekonomian Indonesia dalam 2014-2023 yang mana permasalahan dari tabel 1.1 diantaranya

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi signifikan, terutama pada tahun 2020-2021 yang mencatat angka pertumbuhan terendah, yakni 2,761% dan 1,522% penurunan drastis ini mencerminkan dampak pandemic covid 19 yang menghantam berbagai sector ekonomi secara luas, dan meskipun sempat mengalami pemulihan pada tahun 2023 (4.255%) yang menunjukkan ketidakstabilan dalam pemulihan jangka panjang

Kenaikan pengeluaran pemerintah yang tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, pengeluaran pemerintah terus meningkat, bahkan saat pertumbuhan ekonomi justru menurun, seperti pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan upaya stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Namun peningkatan pengeluaran tersebut belum mampu secara langsung mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Penurunan drastis investasi sejak 2019 data menunjukkan bahwa investasi mengalami penurunan sangat tajam pada tahun 2018 (9,715) ke tahun 2019 (1,109). Hal ini menjadi indikasi adanya penurunan kepercayaan investor, ketidakpastian ekonomi atau hambatan structural dalam iklim investasi nasional. Meskipun tren investasi kembali meningkat secara perlahan sejak 2020-2023, tetap angkanya belum kembali menyamai level tertinggi pada tahun 2018, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pemulihan daya tarik investasi.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa hasil yang ditunjukkan tidak keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan investasi. Ini menimbulkan adanya kesenjangan dalam data, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat teori-teori yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan latar belakang, studi ini hendak melengkapi kajian lebih lanjut tentang **“Pengaruh investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Diindonesia Pada Tahun 2014-2023”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat penulis identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Investasi mengalami kenaikan namun tidak diiringi oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi.
2. Pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan namun pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang diharapkan.
3. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan ditahun tertentu

C. Batasan Masalah

Demi memudahkan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis menitik beratkan pada :

1. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia secara simultan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2014-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2014-2023?

3. Apakah terdapat pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2014-2023?

E. Tujuan Penelitian

Maka berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa pengaruh pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan, serta mendukung penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya, serta menambah khazanah keilmuan terkait pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, khususnya di bidang pembangunan ekonomi. Manfaat Pragmatis: Penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar hasilnya dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah serta menjadi tambahan referensi ilmiah yang bermanfaat bagi perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

G. Defenisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2013-2024, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah penilitan dinyatakan dalam bentuk persen diartikan sebagai perubahan atau peningkatan tingkat pendapatan dan produksi ekonomi dalam periode tertentu yang terjadi di Indonesia.

2. Pengeluaran Pemerintah

Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah di Indonesia diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui penetapan jumlah pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Pengeluaran ini umumnya dinyatakan dalam nilai nominal, seperti jutaan rupiah. Dana tersebut digunakan untuk menghasilkan berbagai produk pemerintah berupa barang dan layanan publik yang ditujukan bagi masyarakat. Pengeluaran pemerintah mencerminkan arah kebijakan yang diambil dan mencakup alokasi dana untuk pembelian barang serta jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan dan pembangunan nasional.

3. Pengaruh Investasi

Investasi di Indonesia diartikan sebagai kegiatan penanaman modal pada suatu perusahaan dengan tujuan meningkatkan jumlah barang modal dan peralatan produksi yang telah ada, sehingga kapasitas produksi dapat bertambah. Nilai investasi umumnya dinyatakan dalam satuan nominal seperti miliaran rupiah. Dalam konteks lain, investasi merujuk pada total nilai realisasi alokasi modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang diarahkan ke berbagai sektor produktif. Sumber investasi ini terbagi menjadi dua, yaitu investasi domestik dan investasi asing.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya produksi barang dan jasa, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian sangat bergantung pada seberapa besar pertumbuhan yang ditunjukkan melalui peningkatan output nasional dari waktu ke waktu. Awalnya, istilah ekonomi berasal dari konsep pengelolaan rumah tangga, namun seiring perkembangan waktu, maknanya meluas hingga mencakup pengelolaan sumber daya negara. Secara umum, ilmu ekonomi sering dipahami sebagai ilmu yang membahas kekayaan atau cara menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Istilah pertumbuhan ekonomi merujuk pada kemajuan atau perkembangan ekonomi yang berlangsung di suatu negara atau wilayah. Laju pertumbuhan ini bisa bervariasi, kadang berjalan lambat, namun di waktu lain bisa mengalami peningkatan yang pesat. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan dalam produksi barang dan jasa, atau dengan kata lain, terjadi perkembangan pada Produk Nasional Bruto (Gross National Product/GNP) potensial. Pertumbuhan ekonomi yang ideal seharusnya tercermin dalam peningkatan output per kapita. Jika output per kapita mengalami kenaikan, maka hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan riil dan peningkatan standar hidup masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat perkembangan GNP potensial yang mencerminkan peningkatan output per kapita serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

(Murni, 2006 : 173).

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari meningkatnya aktivitas ekonomi yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat pun ikut meningkat. Peningkatan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa terjadi karena adanya peningkatan jumlah serta kualitas faktor-faktor produksi yang dimiliki (Syahputra Rinaldi, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara berkelanjutan, yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Menurut Arsyad, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan output, terlepas dari apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan penduduk, serta tanpa mempertimbangkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kuantitatif yang mencerminkan kemajuan perekonomian dalam satu periode tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemajuan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase peningkatan pendapatan nasional dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses di mana kapasitas suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa meningkat secara terus-menerus, dengan tujuan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi seiring berjalannya waktu. Menurut Arsyad, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan hasil produksi, tanpa memperhatikan apakah kenaikan tersebut melampaui atau di bawah laju pertumbuhan penduduk, serta tanpa memperhitungkan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan ekonomi dalam kurun waktu tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Umumnya, perkembangan ini ditunjukkan dalam bentuk persentase kenaikan pendapatan nasional dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDB (Produk Domestik Bruto) yang terus menerus.

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

a. Akumulasi modal

Situasi ini dapat terjadi apabila sebagian pendapatan disisihkan untuk ditabung dan kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan meningkatkan output dan pendapatan di masa mendatang. Investasi tersebut mencakup berbagai bentuk, baik yang berupa penanaman modal baru pada lahan, peralatan fisik, maupun pada pengembangan modal atau sumber daya manusia.

b. Pertumbuhan penduduk

Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan jumlah angkatan kerja, yang secara tradisional dipandang sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya jumlah tenaga kerja berarti meningkatnya jumlah pekerja yang produktif, sementara pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi juga memperluas ukuran pasar domestik.

c. Kemajuan teknologi

Hal ini terjadi akibat adanya penemuan metode baru atau penyempurnaan dari cara-cara lama dalam menyelesaikan pekerjaan tradisional, seperti dalam kegiatan bercocok tanam jagung (Tulus T.H Tambunan, 2011).

Pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari peningkatan permintaan agregat maupun penawaran agregat. Dari sisi permintaan agregat, pertumbuhan dalam perekonomian dapat terjadi karena meningkatnya

Produk Nasional (PN), yang mencakup permintaan dari konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Sementara itu, dari sisi penawaran agregat, peningkatan output dapat disebabkan oleh bertambahnya jumlah faktor-faktor produksi yang dimanfaatkan, seperti tenaga kerja, modal, lahan, dan sumber energi.

Secara prinsip, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang berbeda. Pembangunan ekonomi biasanya diartikan sebagai proses jangka panjang yang menghasilkan peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara, yang disertai dengan perubahan dalam sistem kelembagaan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB), tanpa mempertimbangkan apakah kenaikan tersebut melebihi atau lebih rendah dari pertumbuhan jumlah penduduk, serta tanpa mempersoalkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi (Arsyad, 2010).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai pembangunan ekonomi yang berlangsung di suatu negara. Meskipun sering kali dianggap serupa, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi biasanya diartikan sebagai proses jangka panjang yang menyebabkan peningkatan pendapatan riil per kapita suatu negara, disertai dengan perubahan dalam sistem kelembagaan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB), tanpa memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut melampaui atau tidak laju pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi (Arsyad, 2010).

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam memproduksi berbagai jenis barang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Sementara itu, Iskandar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan nasional yang signifikan, ditunjukkan dengan

naiknya pendapatan per kapita dalam periode waktu tertentu. Sukirno menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi yang mengarah pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur pencapaian suatu perekonomian dari waktu ke waktu (Todaro, 2011).

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui peningkatan produk per kapita yang signifikan. Oleh karena itu, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, perlu ditetapkan prioritas pembangunan yang jelas. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi wilayah adalah dengan menganalisis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Melalui data ini, dapat dilihat seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai serta kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menopang perekonomian wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Peningkatan infrastruktur di daerah turut mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat (Tulus T.H Tambunan, 2011:42).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi membahas berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi, serta menjelaskan hubungan antar faktor-faktor tersebut hingga tercipta suatu proses pertumbuhan. Meskipun terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi, tidak ada satu pun yang dianggap sebagai teori yang sepenuhnya lengkap atau dapat dijadikan acuan baku. Hal ini disebabkan karena setiap teori memiliki ciri khas dan pendekatannya sendiri, yang dipengaruhi oleh latar belakang dan konteks pengembangan teori tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang mencerminkan sisi dinamis dari suatu sistem perekonomian, yang menunjukkan apakah

kondisi ekonomi tersebut mengalami kemajuan atau tidak seiring berjalannya waktu. Berbagai teori mengenai pertumbuhan ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok teori, yaitu :

a. Teori Keynes

Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut teori Keynes, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes berpendapat bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat. Hubungan Belanja Publik dengan Pertumbuhan Ekonomi Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi dapat menyebabkan peningkatan permintaan agregat, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi. Tugas Utama Pemerintah di Negara Berkembang Di negara berkembang, tugas utama pemerintah adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat melakukan hal ini dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah/investasi pemerintah secara langsung di berbagai bidang, seperti pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Publik Pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sektor-sektor publik yang menjadi prioritas adalah pendidikan dan kesehatan, karena investasi pada kedua sektor ini dapat meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan handal, serta memperbaiki standar kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak Investasi Pemerintah pada Sektor Publik Investasi pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, investasi pada sektor-

sektor ini dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan masyarakat, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut teori Keynes, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi adalah positif. Artinya, semakin tinggi pengeluaran pemerintah, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat, konsumsi, dan investasi, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam sintesis, teori Keynes tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerintah dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulannya, Pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat dan aktivitas ekonomi. Investasi pemerintah pada sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi adalah positif, artinya semakin tinggi pengeluaran pemerintah, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Harrod-Domar

Hubungan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Teori Harrod-Domar adalah pengembangan dari analisa Keynes yang berfokus pada persyaratan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil (steady growth). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat dicapai jika terdapat keseimbangan antara pembentukan modal dan

penggunaan barang-barang modal.

Pembentukan Modal dan Pertumbuhan Ekonomi dalam teori Harrod-Domar, pembentukan modal dianggap sebagai faktor kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal ini dapat berupa investasi dalam bentuk fisik, seperti mesin dan peralatan, atau dalam bentuk non-fisik, seperti pendidikan dan pelatihan. Dengan meningkatkan stok modal, perekonomian dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Rasio Modal-Output dan Tabungan Nasional dalam teori Harrod-Domar, rasio modal-output (k) dan tabungan nasional (s) dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Rasio modal-output (k) menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output, sedangkan tabungan nasional (s) menunjukkan proporsi pendapatan nasional yang disimpan dan diinvestasikan.

Hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurut teori Harrod-Domar, investasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat meningkatkan stok modal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan output ekonomi. Dengan demikian, investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kemampuan produksi dan output ekonomi.

3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor yang turut mempengaruhinya, perlu dilakukan analisis terhadap elemen-elemen berikut ini :

Faktor yang Mempengaruhi:

- a. Investasi (Variabel X1) dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Variabel Y) melalui beberapa faktor, seperti:
 - 1) Meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan output ekonomi.

- 2) Meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
 - 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli
- b. Pengeluaran Pemerintah (Variabel X2) dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Variabel Y) melalui beberapa faktor, seperti:
- 1) Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung kegiatan ekonomi
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan
 - 3) Meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengurangi inflasi

Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana Investasi dan Pengeluaran Pemerintah dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia melalui faktor-faktor yang telah disebutkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2014-2023. Dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis regresi linier berganda, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Investasi dan Pengeluaran Pemerintah mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

B. Pengertian Investasi

1. Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Inggris *investment*, yang berakar dari kata *invest*, berarti menanam, dan dalam bahasa Arab dikenal sebagai *istathmara*, yang berarti menghasilkan, berkembang, atau bertambah. Secara umum, investasi merujuk pada kepemilikan atas aset tetap atau harta milik individu maupun perusahaan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan rutin atau keuntungan dari penjualannya, serta biasanya dimiliki dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kasmir dan Jakfar juga mengemukakan definisi serupa, yakni bahwa investasi

merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan jangka panjang pada berbagai sektor usaha atau proyek yang memerlukan pendanaan dengan tujuan mendapatkan laba. Sementara itu, dalam perspektif Islam, investasi diartikan sebagai penempatan dana atau modal pada suatu usaha tertentu, di mana seluruh aktivitasnya—baik objek maupun proses—harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Kamarudin Ahmad, 2002).

Para ekonomi memberikan beragam definisi mengenai investasi, meskipun terdapat kesamaan inti dalam pandangan mereka. Menurut Alexander dan Sharpe, investasi merupakan tindakan mengorbankan nilai tertentu pada masa sekarang demi memperoleh nilai yang belum pasti di masa mendatang. Di sisi lain, Yogyanto menjelaskan bahwa investasi adalah proses menunda konsumsi saat ini untuk dialihkan ke dalam kegiatan produksi yang efisien dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, Tandelilin menyatakan bahwa investasi adalah bentuk komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya pada waktu sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan.

Dalam konteks perhitungan pendapatan nasional, investasi diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh barang-barang modal serta peralatan produksi, baik untuk mengganti barang modal yang telah usang maupun yang lebih utama, untuk menambah jumlah barang modal dalam perekonomian. Tujuan dari investasi ini adalah guna mendukung proses produksi barang dan jasa di masa yang akan datang.

Pengeluaran untuk investasi ditujukan pada pembelian barang-barang yang diharapkan mampu memberikan keuntungan di masa depan. Dengan kata lain, keputusan pengusaha atau perusahaan untuk membeli suatu barang atau jasa didasarkan pada potensi keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh. Harapan akan keuntungan inilah yang menjadi motivasi utama dalam aktivitas investasi. Menurut Sukirno, investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, serta

memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena investasi memiliki tiga fungsi utama: (1) sebagai bagian dari pengeluaran agregat, sehingga peningkatan investasi akan mendorong naiknya permintaan agregat, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal melalui investasi akan meningkatkan kapasitas produksi perekonomian; dan (3) investasi umumnya disertai dengan kemajuan teknologi. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Nopirin, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui peningkatan produksi nasional. Peningkatan tersebut dimungkinkan berkat akumulasi modal yang berasal dari tabungan nasional, yang kemudian dialokasikan untuk kegiatan investasi (Yuliana Eliza, 2015).

Investasi merupakan salah satu elemen penting yang memiliki peranan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak bisa dilepaskan dari naiknya aktivitas investasi. Investasi menjadi faktor kunci dalam menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi, karena selain mampu meningkatkan output secara signifikan, investasi juga akan memicu kenaikan permintaan terhadap faktor produksi. Hal ini pada akhirnya akan membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bertambahnya pendapatan yang diterima. Dalam kajian teori, investasi dipandang sebagai permintaan terhadap modal. Dalam kerangka makroekonomi, investasi diartikan sebagai aliran pengeluaran yang berfungsi untuk menambah stok modal fisik. Stok modal sendiri mengacu pada nilai tetap dari aset fisik seperti bangunan, mesin, dan berbagai jenis inventaris pada suatu titik waktu tertentu. Baik Produk Domestik Bruto (PDB) maupun investasi menggambarkan aliran pengeluaran, dan investasi merujuk pada total dana yang dikeluarkan oleh sektor usaha untuk menambah aset modal dalam periode tertentu.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, aktivitas investasi membawa manfaat yang luas dan berdampak signifikan terhadap

perekonomian suatu negara. Namun, dalam pandangan Islam, terdapat pedoman dan batasan yang jelas mengenai sektor-sektor yang diperbolehkan dan dilarang untuk dijadikan objek investasi. Tidak semua bentuk investasi yang sah menurut hukum positif juga dianggap sah menurut syariat Islam. Oleh karena itu, agar investasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara cermat, sehingga hasil yang diperoleh tetap berada dalam koridor syariah. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam berinvestasi menurut perspektif Islam :

- a. Aspek finansial atau material: Suatu investasi idealnya mampu memberikan keuntungan ekonomi yang kompetitif jika dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan: Investasi harus terbebas dari sektor maupun mekanisme yang bersifat syubhat atau haram. Melibatkan diri dalam investasi yang tidak sesuai syariat dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam kesesatan serta perilaku merusak, baik secara individu maupun sosial (darūrah).
- c. Aspek sosial dan lingkungan: Investasi sebaiknya memberi dampak positif bagi masyarakat luas dan lingkungan sekitar, tidak hanya untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.
- d. Aspek spiritual atau orientasi kepada rida Allah: Pemilihan jenis investasi tertentu seharusnya dilandasi oleh niat untuk memperoleh rida Allah sebagai tujuan utama.

Investasi dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun negara. Adapun tujuan dari kegiatan investasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Investasi untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) masyarakat akan barang dan jasa.

Agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya, baik secara individu, kelompok, maupun sebagai suatu negara, diperlukan pemenuhan kebutuhan dasar (*fulfilling the minimum needs for the life*). Untuk mencukupi kebutuhan pokok tersebut, manusia memerlukan berbagai jenis barang dan jasa, yang penyediaannya memerlukan tahapan serta proses tertentu. Tahap awal dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan demi keberlangsungan hidup masyarakat di masa depan adalah dengan melakukan investasi sejak saat ini. Tanpa adanya investasi, baik yang dilakukan secara sukarela maupun karena terpaksa, akan sulit membayangkan bahwa kebutuhan akan barang dan jasa di masa mendatang dapat terpenuhi.

- b. Investasi untuk memenuhi keinginan (*wants*) masyarakat akan barang dan jasa

Seiring kemajuan zaman, peradaban manusia turut mengalami perkembangan dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup. Upaya untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik memunculkan berbagai kebutuhan baru, seperti keinginan untuk rekreasi dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup tuntutan tambahan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kegiatan investasi menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh.

2. Teori Investasi

Investasi merupakan aktivitas menempatkan sejumlah dana dengan tujuan untuk menjaga, meningkatkan nilai, atau memperoleh keuntungan yang positif di masa depan. Dengan kata lain, investasi adalah proses menanamkan modal dengan harapan mendapatkan imbal hasil serta pertumbuhan nilai aset yang ditanamkan. Teori investasi menyatakan bahwa investasi merupakan penyesuaian terhadap stok modal selama

periode tertentu. Di sini, investasi merupakan konsep aliran, bukan konsep stok seperti modal. Ini menyiratkan bahwa modal dihitung dengan memperhitungkan periode pendek, sedangkan investasi dihitung dalam periode panjang. Investasi dapat dikelompokkan dengan teori yaitu:

a. Teori Investasi Neoklasik

Teori Investasi Neoklasik tentang akumulasi modal optimal berfungsi sebagai landasan teori ini. Teori ini menyatakan bahwa output dan biaya layanan modal terhadap biaya output menentukan stok modal yang diinginkan. Biaya barang modal, suku, bunga, dan pajak penghasilan perusahaan. Mempengaruhi biaya layanan modal akibatnya, perubahan hasil atau biaya layanan modal relative terhadap biaya output memengaruhi stok modal yang diinginkan.

b. Teori Keynes

Menekankan bahwa investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga dan *Marginal Efficiency of Capital* (MEC). Jika MEC lebih besar dari tingkat bunga, investasi akan dilakukan jika tidak investasi cenderung menurun.

c. Teori Harrod-Domar

Menggambarkan hubungan antara pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi, di mana investasi dianggap sebagai pengeluaran yang meningkatkan kapasitas produksi Ahmad (Kamaruddin, 2004).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Dilihat dari sisi penggunaannya, investasi dapat diartikan sebagai pembentukan modal tetap dalam negeri. Investasi juga merupakan bagian penting dari permintaan agregat dan menjadi faktor utama dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Keberhasilan pembangunan, salah satunya, ditandai oleh tingginya pendapatan nasional atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang kuat dan stabil. Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi tingkat investasi, antara lain :

a. Suku Bunga

Suku bunga dapat dianggap sebagai imbal hasil yang diperoleh dari aktivitas menabung. Ketika suku bunga tinggi, rumah tangga cenderung meningkatkan jumlah tabungannya karena pendapatan yang diperoleh dari bunga menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, minat untuk menabung menurun, karena masyarakat merasa lebih menguntungkan menggunakan uang tersebut untuk konsumsi atau kegiatan investasi. Oleh karena itu, pada saat suku bunga berada pada tingkat rendah, masyarakat cenderung meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi atau investasi (Satria Aswin Yoman Doni, 2022).

Pengaruh suku bunga kredit terhadap investasi dapat dijelaskan melalui pandangan para ekonom Klasik, yang menyatakan bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Artinya, ketika suku bunga meningkat, minat untuk berinvestasi cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa investor hanya akan meningkatkan investasinya apabila keuntungan yang diharapkan melebihi suku bunga yang harus dibayar, yang dalam hal ini merupakan biaya penggunaan modal (cost of capital). Sebaliknya, jika suku bunga menurun, maka biaya penggunaan dana menjadi lebih rendah, sehingga investor akan lebih terdorong untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi (Zahra dkk, 2022).

b. Tingkat Inflasi

Pandangan para ekonom Klasik menyatakan bahwa tingkat suku bunga memiliki hubungan langsung dengan keputusan investasi, di mana investasi dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Ketika suku bunga naik, kecenderungan untuk melakukan investasi akan menurun. Hal ini disebabkan karena investor hanya akan melakukan investasi jika keuntungan yang diperoleh lebih tinggi dari suku bunga yang harus dibayar sebagai biaya modal (cost of capital). Sebaliknya, apabila suku bunga menurun, maka biaya untuk menggunakan dana juga menjadi lebih rendah, sehingga mendorong investor untuk lebih aktif dalam

melakukan investasi :

- 1) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)
- 2) Inflasi Desakan Biaya (*Cosh Pull Inflation*)

c. Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) atau Human Resources memiliki dua makna utama. Pertama, SDM merujuk pada tenaga atau jasa yang dapat diberikan seseorang dalam proses produksi. Dalam konteks ini, SDM mencerminkan tingkat kualitas dan kontribusi kerja yang diberikan individu dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, SDM mengacu pada individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan memberikan jasa atau tenaga kerja. Kemampuan bekerja diartikan sebagai kesanggupan melakukan aktivitas yang bernilai ekonomi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan untuk bekerja diukur berdasarkan usia. Dengan demikian, mereka yang berada dalam rentang usia produktif dianggap memiliki kapasitas untuk bekerja. Kelompok penduduk yang berada pada usia kerja ini disebut tenaga kerja atau manpower, yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai seluruh penduduk yang berada dalam usia kerja (Amalia Nuril Hidayati, 2017).

d. Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar, atau kurs, merupakan perbandingan harga antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Krugman (2000) menyatakan bahwa nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang yang dinyatakan dalam bentuk mata uang asing. Dengan kata lain, nilai tukar mencerminkan harga relatif antara dua mata uang dari negara yang berbeda. Fluktuasi nilai tukar di pasar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental maupun non-fundamental. Faktor-faktor fundamental ini tercermin melalui indikator-indikator ekonomi makro. Beberapa elemen utama yang memengaruhi perubahan nilai tukar antara lain adalah:

- 1) Faktor fundamental
- 2) Faktor teknis
- 3) Sentimen Pasar

4. Jenis-Jenis Investasi

Jenis investasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keterlibatan atau pengawasan investor terhadap perusahaan, yaitu menjadi investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung merujuk pada penanaman modal jangka panjang yang dilakukan pada usaha baru maupun usaha yang telah berjalan, di mana investor secara aktif terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan kegiatan bisnis tersebut. Sedangkan investasi tidak langsung bisa juga disebut investasi portofolio merupakan investasi jangka pendek dan lebih spekulatif karena keleluasaan investor

C. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mankiw, belanja pemerintah termasuk dalam komponen permintaan agregat, karena ketika pengeluaran pemerintah meningkat, maka permintaan agregat juga akan mengalami kenaikan. Di negara-negara berkembang, pengeluaran pemerintah memiliki peran yang sangat besar, mengingat sektor swasta belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah masih menjadi faktor penting dalam kegiatan ekonomi. Kenaikan permintaan agregat mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan tersebut diukur berdasarkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui penetapan jumlah pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk tingkat nasional dan APBD untuk tingkat daerah. Tujuan utama dari kebijakan fiskal ini adalah untuk

menjaga stabilitas harga, mengatur tingkat produksi dan kesempatan kerja, serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika pemerintah memutuskan untuk membeli barang atau jasa, pengeluaran tersebut menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Secara umum, pengeluaran pemerintah merujuk pada total belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi kepentingan publik. Ini mencakup pengeluaran untuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, pembiayaan pasukan keamanan seperti polisi dan militer, pembayaran gaji pegawai negeri, serta pembangunan infrastruktur, semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah yang dikategorikan sebagai belanja tidak langsung merupakan jenis pengeluaran yang tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Jenis belanja ini mencakup belanja untuk pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta biaya pemeliharaan. Anggaran dalam kategori ini memiliki peranan strategis dalam mendukung kelancaran operasional sistem pemerintahan dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai target dan tujuan pembangunan di setiap tahapannya. Komponen belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dana bagi hasil, bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Belanja pegawai dalam belanja tidak langsung merujuk pada pengeluaran yang digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, serta penghasilan lainnya bagi pegawai negeri sipil. Pengeluaran pemerintah berdasarkan belanja langsung adalah pengeluaran yang dialokasikan secara spesifik untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Belanja langsung ini berfungsi sebagai investasi pemerintah yang dapat meningkatkan aset masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun nonfisik. Pengeluaran daerah dalam konteks pembangunan

diarahkan untuk mendanai berbagai program pembangunan, sehingga pengalokasian anggarannya disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dikumpulkan. Dalam penelitian ini, belanja langsung mencakup keseluruhan pengeluaran langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Adapun belanja pegawai yang termasuk dalam belanja langsung adalah pengeluaran berupa upah yang diberikan sebagai imbalan atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah daerah. (Tomi Prio Haryanto, 2013).

2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro:

a. Teori Makro Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam konteks riil dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana aktivitas pemerintahan didanai oleh anggaran belanja negara. Semakin banyak aktivitas atau program yang dilaksanakan pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat pengeluarannya. Dalam kajian ekonomi makro, pengeluaran pemerintah umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Merupakan alokasi dana pemerintah yang digunakan untuk membeli berbagai barang dan jasa guna mendukung operasional serta pelayanan publik.
- 2) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Pengeluaran ini berkaitan dengan pembayaran gaji aparatur negara. Perubahan dalam besaran gaji pegawai dapat memberikan dampak pada perekonomian makro, karena secara tidak langsung memengaruhi tingkat permintaan agregat masyarakat.
- 3) Pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer pembayaran (transfer payment). Transfer payment adalah pengeluaran pemerintah yang tidak terkait dengan pembelian barang atau jasa di pasar, melainkan berupa pemberian langsung kepada individu atau kelompok

masyarakat. Contohnya meliputi subsidi, bantuan sosial, pembayaran pensiun, serta bunga utang pemerintah kepada masyarakat.

b. Teori Mikro Pengeluaran Pemerintah

Tujuan dari teori mikro terkait pertumbuhan pengeluaran pemerintah adalah untuk mengkaji berbagai faktor yang mendorong timbulnya permintaan terhadap barang publik serta faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan barang publik tersebut. Interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang publik inilah yang menentukan seberapa besar jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran pemerintah. Ketersediaan barang publik tersebut kemudian akan memicu permintaan lanjutan terhadap jenis barang lainnya.

Selain itu menurut para ahli teori pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi:

a. Teori Rostow dan Musgrave

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave, yang mengaitkan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dengan fase-fase dalam proses pembangunan ekonomi, yakni tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjutan. Menurut pandangan mereka, pada tahap awal pembangunan ekonomi, rasio antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional cenderung tinggi. Hal ini disebabkan oleh besarnya porsi investasi pemerintah dibandingkan total investasi secara keseluruhan, karena pada tahap ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur dasar seperti layanan pendidikan, kesehatan, serta sarana transportasi.

Pada tahap menengah dalam proses pembangunan ekonomi, peran investasi pemerintah masih dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan agar dapat mencapai titik lepas landas. Namun, pada fase ini, kontribusi sektor swasta terhadap investasi mulai meningkat secara signifikan. Meskipun demikian, keterlibatan pemerintah tetap dominan karena meningkatnya peran swasta sering kali menimbulkan kegagalan

pasar, sehingga pemerintah perlu menyediakan lebih banyak barang dan jasa publik dengan kualitas yang lebih tinggi. Di samping itu, kompleksitas hubungan antar sektor ekonomi juga meningkat seiring perkembangan. Sebagai contoh, pertumbuhan sektor industri dapat menyebabkan peningkatan polusi udara dan air, yang mengharuskan pemerintah campur tangan untuk mengatur dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi para pekerja yang berada dalam posisi kurang menguntungkan, guna meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Teori yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave merupakan hasil dari pengamatan terhadap proses pembangunan ekonomi di berbagai negara, meskipun tidak didasarkan pada kerangka teori tertentu secara eksplisit. Selain itu, teori ini belum secara tegas menjelaskan apakah tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi secara berurutan atau bisa berlangsung secara bersamaan dalam beberapa tahap sekaligus (Mangkoesobroto, 1993).

b. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner, melalui pengamatan empiris terhadap negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19, menemukan bahwa keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi cenderung mengalami peningkatan. Wagner mengamati rasio antara pengeluaran pemerintah dan Produk Domestik Bruto (PDB), lalu mengembangkan teori yang menjelaskan bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan semakin besar seiring waktu. Ia berpendapat bahwa ketika pendapatan per kapita suatu negara meningkat, maka secara proporsional pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Hal ini terutama disebabkan oleh perlunya peran pemerintah dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti hukum, pendidikan, budaya, rekreasi, dan hubungan sosial lainnya.

Menurut Wagner, terdapat lima faktor utama yang mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah secara terus-menerus, yaitu:

meningkatnya kebutuhan akan perlindungan di bidang keamanan dan pertahanan, naiknya pendapatan masyarakat, proses urbanisasi yang terjadi seiring pertumbuhan ekonomi, kemajuan dalam sektor ekonomi itu sendiri, serta berkembangnya sistem demokrasi dan munculnya ketidakefisienan dalam birokrasi sebagai dampak dari perluasan peran pemerintahan.

c. Teori Peacock Wiseman

Peacock dan Wiseman merupakan dua tokoh yang mengemukakan salah satu teori paling dikenal mengenai pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Mereka menawarkan sudut pandang berbeda dalam menjelaskan dinamika perkembangan aktivitas pemerintah, dengan menitikberatkan pada analisis antara penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam pandangan mereka, pemerintah cenderung berupaya meningkatkan belanjanya dengan cara memperbesar penerimaan, khususnya dari sektor perpajakan. Namun, di sisi lain, masyarakat cenderung tidak menyukai beban pajak yang tinggi.

Peacock dan Wiseman membangun teorinya berdasarkan gagasan bahwa masyarakat memiliki batas toleransi terhadap pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat masih dapat menerima besarnya pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Artinya, masyarakat memahami bahwa pemerintah memerlukan dana untuk menjalankan fungsinya, sehingga muncul kesediaan tertentu untuk membayar pajak. Namun, batas toleransi ini juga menjadi pembatas bagi pemerintah agar tidak menaikkan pajak secara sewenang-wenang. Menurut Peacock dan Wiseman, pertumbuhan ekonomi secara alami mendorong peningkatan penerimaan pajak, meskipun tarif pajak tetap. Kenaikan penerimaan pajak tersebut kemudian mendorong bertambahnya pengeluaran pemerintah. (Mangkoesebroto, 1993)

Menurut teori Peacock dan Wiseman, pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan penerimaan pajak, meskipun tarif

pajaknya tidak mengalami perubahan. Peningkatan penerimaan tersebut kemudian berdampak pada bertambahnya belanja pemerintah. Dengan demikian, dalam kondisi normal, pertumbuhan Produk Nasional Bruto (GNP) akan diikuti oleh peningkatan pendapatan negara sekaligus pengeluaran pemerintah. Pandangan Peacock dan Wiseman mengenai pentingnya peran pajak dalam membiayai pengeluaran negara diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Erik Lindahl. Lindahl menyatakan bahwa penyediaan infrastruktur oleh pemerintah dibiayai melalui pungutan pajak dari seluruh masyarakat yang berstatus wajib pajak dengan proporsi yang sama. Namun, untuk menghindari ketidakpuasan publik terhadap beban pajak, pemerintah kemudian menetapkan tarif pajak berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Walaupun tarif pajak yang dikenakan berbeda-beda antar kelompok masyarakat, pemerintah tetap menargetkan agar total penerimaan pajak setara dengan skenario ketika tarif pajak diberlakukan secara seragam.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan pengeluaran rutin guna menjalankan tugas dan fungsinya, seperti memastikan kelancaran administrasi pemerintahan, mendukung kegiatan operasional serta pemeliharaan aset negara, memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga kestabilan ekonomi. Besarnya pengeluaran rutin ini ditentukan oleh kebijakan fiskal pemerintah dalam mengelola keuangan negara serta kondisi stabilitas ekonomi. Umumnya, peningkatan pengeluaran pemerintah disebabkan oleh bertambahnya belanja pegawai dan kewajiban pembayaran utang negara.

Untuk mengubah satu jenis sekuritas yang dibeli ke jenis sekuritas lainnya yang dianggap lebih menguntungkan (The World Bank, 2010).

Berikut pengertian investasi langsung dan tidak langsung:

a. Investasi Langsung

Investasi langsung dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) mendirikan usaha atau perusahaan baru, dan (2) menanamkan modal pada perusahaan yang sudah ada, baik melalui reorganisasi, ekspansi usaha, merger, maupun akuisisi. Secara umum, investasi langsung memberikan berbagai manfaat bagi negara penerima (host country), seperti transfer teknologi, pengembangan produk, transfer pengetahuan (know-how), peningkatan pangsa pasar, penguatan keterampilan manajerial, hingga penciptaan lapangan kerja.

b. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung, atau yang dikenal sebagai investasi portofolio, merupakan bentuk investasi jangka pendek yang bersifat spekulatif. Dalam praktiknya, investor memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan investasinya dari satu instrumen sekuritas ke instrumen lainnya yang dinilai lebih menguntungkan. Investasi jenis ini umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Partisipasi modal/penyertaan (*equity participation*) Merupakan pembelian saham oleh investor tanpa disertai keterlibatan langsung dalam manajemen atau pengawasan operasional perusahaan.
- 2) Pembelian surat berharga yang bersifat penyertaan (*equity securities*) Meliputi investasi pada surat berharga yang bersifat kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, opsi (option), serta investasi melalui instrumen berbasis utang seperti pinjaman, obligasi, surat utang (debenture), atau notes.
- 3) Perjanjian kontraktual seperti *turnkey contract* atau Investasi yang dilakukan melalui kontrak kerja sama seperti *turnkey contract* atau lisensi, di mana investor tidak terlibat dalam pengelolaan atau pengambilan keputusan perusahaan (The World Bank, 2010).

Di Indonesia jenis investasi yang tersebar secara umum ada beberapa macam. Berikut penjelasan mengenai jenis investasi tersebut:

a. Saham

Pada investasi saham, seorang investor dapat memiliki hak kepemilikan suatu perusahaan tertentu dengan deviden sebagai imbalan dari alokasi dana yang telah dikeluarkan untuk pengembangan perusahaan tersebut. Saham adalah bentuk penawaran dari suatu perusahaan kepada publik untuk menanamkan dana sebagai bentuk investasi. Dengan membeli saham, seseorang secara otomatis memiliki sebagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut, sesuai dengan jumlah saham yang dibeli. Dana yang diinvestasikan akan digunakan oleh perusahaan sebagai modal untuk mengembangkan usahanya. Pemilik saham berpotensi memperoleh keuntungan berupa dividen. Nilai saham bersifat tidak stabil atau fluktuatif, tergantung pada kondisi pasar. Apabila kinerja perusahaan baik dan pertumbuhannya positif, harga saham cenderung meningkat, dan sebaliknya, jika perusahaan mengalami penurunan kinerja, maka nilai saham bisa turun. Jika seseorang yakin bahwa saham suatu perusahaan akan mengalami kenaikan nilai, maka sebaiknya segera melakukan pembelian. Transaksi jual beli saham dilakukan melalui perusahaan sekuritas. Keuntungan dari investasi saham tidak bisa diprediksi secara pasti karena sangat bergantung pada performa perusahaan tersebut. Potensinya bisa sangat besar, tetapi juga bisa menimbulkan kerugian yang signifikan. Prinsip dasar yang perlu diingat adalah: semakin tinggi risiko, semakin besar pula peluang keuntungan.

b. Obligasi

Investasi obligasi merupakan sebuah langkah peminjaman dana investor pada sebuah lembaga atau pemerintah dengan imbalan berupa bunga tetap secara berkala dan juga sejumlah uang pada saat jatuh tempo. Obligasi merupakan surat berharga berupa bukti pinjaman yang menunjukkan bahwa kita telah meminjamkan dana kepada suatu

perusahaan atau pemerintah. Pihak penerbit obligasi berkewajiban membayar bunga kepada pemegang obligasi dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, masa jatuh tempo obligasi berlangsung lebih dari satu tahun. Obligasi pemerintah dianggap sebagai instrumen yang paling aman dibandingkan obligasi lainnya. Dari sisi keuntungan, obligasi umumnya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Namun, karena masa jatuh temponya cukup panjang, obligasi tergolong kurang likuid. Artinya, investor tidak bisa langsung mencairkan dana sebelum jatuh tempo, kecuali dengan menjualnya di pasar sekunder. Risiko lain yang harus diperhatikan adalah kemungkinan kebangkrutan perusahaan penerbit obligasi, yang dapat menyebabkan hilangnya dana yang telah diinvestasikan. Hal ini mencerminkan prinsip dasar dalam dunia investasi: semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula tingkat risikonya. (Pardiansyah Elif, 2017).

c. Reksadana

Investasi pada reksadana berarti sebuah aktivitas pengumpulan dana dari berbagai investor untuk disalurkan pada saham perusahaan atau obligasi dengan pengelola manager investasi. Pada jenis ini, investor dapat memilih investasi pada dana ekuitas atau dana utang tergantung pada kesiapan investor dalam menanggung risiko yang harus diterima. Reksadana merupakan wadah untuk mengumpulkan dana dari sejumlah investor secara bersama-sama. Dana yang terhimpun tersebut kemudian dikelola oleh Manajer Investasi dan dialokasikan ke berbagai instrumen investasi lainnya. Keuntungan maupun kerugian yang dihasilkan dari investasi tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh investor. Reksadana bisa menjadi pilihan yang tepat bagi pemula yang ingin mulai berinvestasi dengan cara yang praktis dan terdiversifikasi.

Setiap jenis reksadana memiliki tingkat risiko yang berbeda, tergantung pada kategori yang dipilih. Jenis-jenis reksadana meliputi

reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Reksadana dapat dianggap sebagai langkah awal atau sarana pembelajaran bagi investor pemula sebelum terjun ke dunia investasi secara langsung, karena melalui reksadana, investor dapat mempelajari jenis-jenis investasi yang potensial. Manajer investasi biasanya secara terbuka menginformasikan aset apa saja yang mereka kelola, di mana dana diinvestasikan, serta berapa keuntungan yang diperoleh. Informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membentuk wawasan dan strategi jika ingin berinvestasi secara mandiri di kemudian hari. Namun demikian, kekurangan dari reksadana adalah kemungkinan timbulnya ketidakpuasan terhadap hasil kinerja manajer investasi. Keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada hasil dari instrumen investasi yang dipilih, dan tentu saja ada biaya yang harus dibayarkan sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan dana tersebut.

d. Unit *Linked Insurance Plans* (ULIP)

Investasi jenis ini merupakan investasi yang memberikan manfaat berupa keuntungan finansial dan asuransi jiwa (Firmansyah et al., 2022).

e. Tabungan

Tabungan dalam konteks ini merujuk pada aktivitas menyimpan uang di bank. Dana yang disimpan akan ditahan oleh pihak bank selama jangka waktu yang ditentukan sesuai keinginan nasabah. Penarikan dana dapat dilakukan kapan saja, baik secara langsung melalui teller maupun melalui layanan elektronik seperti ATM atau mobile banking. Namun, dana dalam tabungan cenderung cepat berkurang karena sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tabungan termasuk bentuk investasi yang paling sederhana, memiliki risiko yang sangat rendah, tetapi juga memberikan imbal hasil yang minim. Prinsip dasar investasi tetap berlaku: semakin kecil risikonya, semakin kecil pula potensi keuntungannya. Bahkan, dalam beberapa kasus, nilai tabungan bisa menyusut secara tidak langsung karena adanya berbagai fasilitas

kemudahan yang disediakan bank untuk mengelola keuangan. Umumnya, bunga yang diberikan bank untuk tabungan berkisar sekitar 1% per tahun.

f. Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan di bank yang disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dana yang ditempatkan dalam deposito hanya dapat dicairkan setelah jatuh tempo. Jika dana ditarik sebelum waktunya, nasabah akan dikenakan penalti sesuai ketentuan yang berlaku. Jenis investasi ini tergolong berisiko rendah, sehingga keuntungannya juga relatif kecil. Investor tidak perlu melakukan tindakan aktif selain menyetor dana di awal. Meskipun demikian, imbal hasil deposito umumnya lebih tinggi dibandingkan tabungan karena adanya komitmen waktu penyimpanan. Saat ini, bunga deposito rata-rata berkisar sekitar 5% per tahun. Selain itu, deposito tidak membutuhkan dana dalam jumlah besar; biasanya terdapat rentang nominal tertentu yang menentukan kategori atau jenis deposito yang dipilih.

g. Properti

Properti dalam konteks ini mencakup aset seperti tanah, rumah, ruko, dan sebagainya. Segala bentuk lahan yang secara hukum menjadi milik pribadi, baik yang sudah dibangun maupun belum, termasuk dalam kategori properti. Karakteristik properti serupa dengan emas, yaitu nilainya cenderung meningkat seiring waktu. Namun, berbeda dari emas, properti tidak mudah dicairkan karena proses penjualannya memerlukan waktu dan belum tentu langsung menghasilkan harga sesuai harapan. Jika berencana membeli rumah di kawasan perumahan yang masih dalam tahap pembangunan, penting untuk memastikan kredibilitas pengembang serta kejelasan perjanjian yang disepakati. Hal ini untuk menghindari potensi kerugian, karena terdapat kasus di mana pembangunan tidak dilanjutkan meskipun pembayaran telah dilakukan. Tantangan utama dalam berinvestasi di sektor properti adalah besarnya

modal yang dibutuhkan. (Firmansyah et al., 2022).

D. Hubungan Antara Variabel

1. Hubungan Pengaruh Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan penambahan investasi baru sebagai bagian dari stok modal. Semakin besar jumlah dana yang diinvestasikan, maka semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Peningkatan jumlah investasi diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena penambahan modal memiliki peranan penting dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, baik investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengumpulan dana yang kemudian dialokasikan ke sektor-sektor produktif, dengan cara meningkatkan laju investasi (Dumairy, 1997).

2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui upaya pembangunan ekonomi di wilayahnya masing-masing, yakni dengan mengaktifkan berbagai kegiatan ekonomi lokal. Besarnya peran tersebut dapat tercermin dari jumlah pengeluaran pemerintah daerah. Semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, maka semakin kuat pula dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi—artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah cenderung diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sementara rendahnya pengeluaran berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi (Tomi Prio Haryanto, 2013).

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya:

Penelitian yang dilakukan Isthafan Najmi, A. Rahmat Adi dan Arienal

Martha Zulha (2025) dalam bentuk jurnal yang berjudul **”Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”** Peran pemerintah daerah sangat strategis dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui pelaksanaan pembangunan di tingkat regional, khususnya dengan menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi di daerah. Tingkat keterlibatan pemerintah daerah ini dapat dilihat dari seberapa besar anggaran yang dikeluarkan. Semakin besar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, maka semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, terdapat korelasi positif antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi: ketika belanja pemerintah meningkat, pertumbuhan ekonomi cenderung ikut naik; sebaliknya, jika belanja pemerintah rendah, maka pertumbuhan ekonomi pun berisiko melambat.

Penelitian yang dilakukan oleh Shantika Amanda, Asih Murwiati (2025) dalam bentuk jurnal yang berjudul **“Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2023”** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pengaruh investasi, belanja pemerintah, inflasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2010 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode sampling sensus, yaitu teknik pengambilan sampel yang melibatkan seluruh elemen dalam populasi. Dengan pendekatan ini, semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel, sehingga data yang diperoleh mencerminkan keseluruhan populasi tanpa adanya kesalahan pengambilan sampel. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh gambaran populasi yang menyeluruh dan akurat. Dalam konteks penelitian ini, sampel terdiri dari 34 provinsi di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews versi 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan

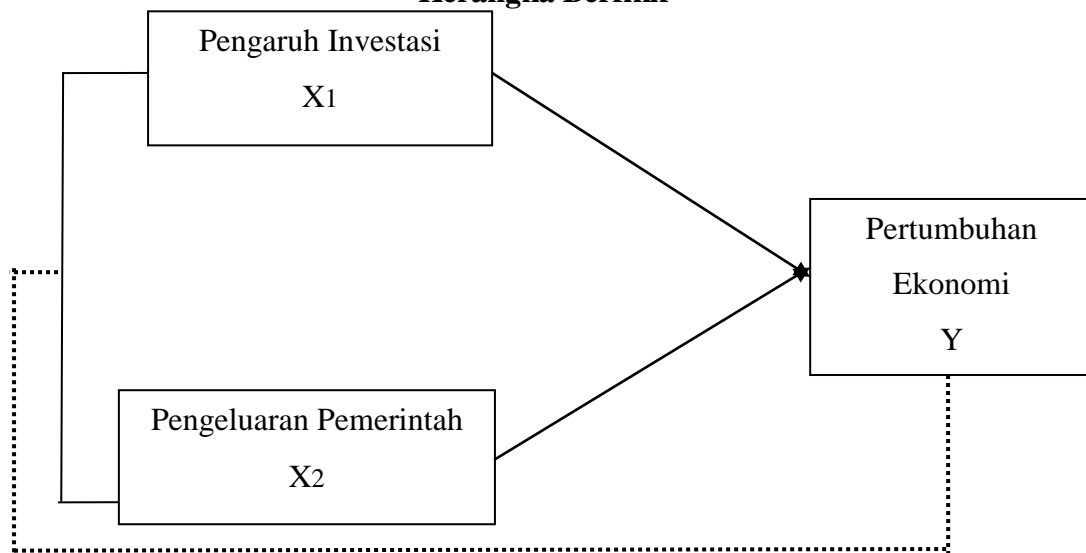
investasi mampu mendorong aktivitas ekonomi di seluruh wilayah provinsi. Belanja pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan, menandakan bahwa peran belanja daerah penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Sebaliknya, inflasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa perubahan harga barang dan jasa tidak berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat memperkuat ekonomi daerah dengan meningkatkan kapasitas fiskal untuk mendanai kegiatan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Riznaky Roosmanita, Jhonny Marbun, (2022) dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pengaruh Ekspor, Investasi, Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2021” Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Berbagai faktor dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah ekspor, investasi, konsumsi rumah tangga, serta belanja pemerintah terhadap perekonomian Indonesia pada periode 2012–2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Keuangan.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ekspor, investasi, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah masing-masing memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 96,1%, sementara sisanya sebesar 3,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

F. Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



Keterangan :

X = Variabel bebas (Independen)

Y = Variabel Terikat (Dependen)

..... = Berpengaruh Secara Simultan

—— = Berpengaruh Secara Parsial

G. Hipotesis

H01 : Investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha1 : Investasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

H02 : Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha2 : Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

H03 : Investasi dan pengeluaran pemerintah secara bersamaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha3 : Investasi dan pengeluaran pemerintah secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada paradigma positivisme dan diterapkan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen penelitian yang telah disusun sebelumnya, dan analisis data dilakukan secara numerik atau statistik dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis hubungan serta pengaruh antara variabel independen, yaitu investasi (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2), terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi (Y).

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Indonesia dengan waktu penelitian selama periode 2014-2023 berupa data pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari badan pusat statistik di Indonesia adapun waktu penelitian:

**Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian**

Uraian	2024			2025							
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
Bimbingan Proposal											
Seminar Proposal											
Revisi setelah seminar											
Pengolahan Data dan Analisis Data											
Bimbingan Skripsi											
Sidang Munaqasyah											
Revisi Setelah Sidang											

Sumber: Olahan Penelitian

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian, khususnya yang berkaitan dengan data runtut waktu (time series). Tahapan ini sangat krusial karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti maupun untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara menelusuri, menelaah, membaca, dan mencatat data yang telah tersedia serta memiliki relevansi dengan objek penelitian. Data tersebut di akses melalui situs web resmi BPS Indonesia www.indonesia.bps.go.id.

D. Teknik Analisis Data

Agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penerapan teknik analisis data yang tepat. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi mengenai pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi selama periode 2014–2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan validitas hubungan antara variabel-variabel dalam model regresi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi memenuhi syarat-syarat statistik yang diperlukan. Adapun jenis-jenis uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada variabel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak, dan biasanya dilakukan sebelum data dianalisis menggunakan model penelitian tertentu. Salah satu metode yang dianggap tepat untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah metode Kolmogorov-

Smirnov. Apabila hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka data residual dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan $\alpha = 0,05$, maka data residual dinyatakan tidak berdistribusi normal. Dengan menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26 for windows*.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Jika varians residual antar pengamatan tetap atau konstan, maka kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varians residual berbeda-beda antar pengamatan, maka disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, dapat dilakukan melalui analisis visual menggunakan grafik scatterplot. Dengan menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26 for windows* (Sugiyono, 2016).

c. Metode Multikolinieritas

Menurut Ghazali, uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang ideal adalah model yang bebas dari gejala multikolinieritas. Untuk mendeteksinya, digunakan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) sebagai indikator. Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinieritas. Dengan menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26 for windows*.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan yang erat antar data dalam suatu model, khususnya jika terdapat korelasi antara satu pengamatan dengan pengamatan sebelumnya. Asumsi ini menyatakan bahwa kemunculan suatu data dapat

dipengaruhi oleh data sebelumnya. Apabila ditemukan adanya korelasi seperti itu, maka kondisi tersebut disebut sebagai masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson (DW test) untuk mengetahui apakah model regresi mengandung gejala autokorelasi atau tidak.

2. Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Bentuk umum persamaan dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + e$$

Kasual satu variabel independen satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana :

Keterangan :

Y = Pertumbuhan ekonomi

B_0, B_1 = Koefisien

X_1 = Pengaruh Investasi

X_2 = Pengeluaran Pemerintah

e = Error

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi. Koefisien ini memberikan gambaran mengenai tingkat kecocokan antara model dengan data yang digunakan. Nilai R^2 berada dalam rentang 0 hingga 1. Koefisien ini juga menunjukkan seberapa kuat model mampu menjelaskan perubahan pada variabel terikat. Apabila nilai adjusted R^2 yang diperoleh dalam analisis empiris menunjukkan angka negatif, maka dianggap bernilai nol. Secara matematis, jika $R^2 = 1$, maka adjusted R^2 juga bernilai 1. Namun, bila $R^2 = 0$, maka nilai adjusted R^2 dapat dihitung dengan rumus $(1 - k)/(n - k)$. Dalam hal jumlah variabel independen (k) lebih dari satu, adjusted R^2 akan

menghasilkan nilai positif. Dengan menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26 for windows* (Sugiyono, 2016).

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji t bertujuan untuk mengukur signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk menganalisis apakah variabel investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26 for windows*. Langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$ maka menerima hipotesis nol (H_0) artinya variabel pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$ maka menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternative (H_a), maka secara parsial dapat dibuktikan bahwa semua variabel bebas pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- 3) Jika nilai probabilitas (signifikansi t) lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima, yang berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas (signifikansi t) lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F merupakan pengujian yang digunakan untuk menilai signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang terdapat dalam model regresi secara simultan memiliki pengaruh

terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan secara pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 26 for windows*. Dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- 1) H_0 diterima, H_a ditolak bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan atau $Sig > 0,05$
 - 2) H_0 ditolak, H_a diterima bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan atau $Sig < 0,05$.
- (Sulityo, 2022)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Indonesia

Presiden : Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto, S.I.P.

Wakil Presiden : Gibran Rakabuming Raka, S.E.

Ibu Kota Negara : Nusantara

Luas Wilayah : 1.916.906 km²

Indonesia, yang secara resmi dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Oseania, serta diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nama "Indonesia" berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu Indus yang merujuk pada Sungai Indus di India, dan Nesos yang berarti "pulau", sehingga Indonesia dapat diartikan sebagai "Kepulauan Hindia". Negara ini memiliki batas darat langsung dengan Malaysia di wilayah Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, serta dengan Timor Leste di Pulau Timor. Selain itu, Indonesia juga berbatasan secara maritim dengan sejumlah negara seperti Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan India.

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia memiliki bendera Merah Putih dengan lambang negara adalah burung Garuda dan pemerintahannya adalah Kesatuan Presidensial Republik Konstitusional dengan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Semboyan yang dianut Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika (Walaupun Berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya dan Ideologi Nasional adalah Pancasila serta bahasa resmi adalah bahasa Indonesia.

Indonesia menempati urutan ke-14 sebagai negara terluas di dunia dan merupakan negara kepulauan terbesar serta peringkat keenam sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut gugusan pulau di wilayah Indonesia adalah "Nusantara". Dari segi jumlah penduduk, Indonesia menempati posisi keempat terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 279 juta jiwa pada tahun 2023. Negara ini juga dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 238,8 juta orang atau sekitar 86,9% dari total penduduk. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman ras, etnis, dan budaya. Terdapat sekitar 1.340 kelompok etnis dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh nusantara. Keberagaman ini juga tercermin dalam agama yang dianut oleh penduduknya, yaitu: Islam (86,9%), Kristen (10,72%) — yang terdiri dari Protestan (7,6%) dan Katolik (3,12%) — Hindu (1,74%), Buddha (0,77%), Konghucu (0,03%), serta kepercayaan lainnya (0,04%)

Selain keberagaman etnis dan agama, budaya Indonesia juga tercermin melalui pakaian tradisional, musik, dan tarian khas daerah. Setiap etnis menggunakan pakaian adatnya saat merayakan acara atau hari penting di wilayahnya masing-masing. Indonesia juga kaya akan ragam musik dan tarian tradisional yang beragam, karena adanya banyak suku bangsa. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam musik dan tarian tradisional yang biasanya terinspirasi oleh nilai budaya dan cerita rakyat setempat.

Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa mulai datang ke kepulauan Indonesia dan bersaing memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Maluku selama masa penjajahan. Setelah berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, Indonesia dikenal dengan nama Hindia Belanda. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada akhir Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak itu, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masalah besar, mulai dari bencana alam, praktik korupsi yang meluas, konflik sosial, gerakan separatis, hingga proses

demokratisasi serta periode pembangunan yang ditandai oleh perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan modernisasi yang cepat.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga menyebabkan perkembangan ekonomi tidak merata di berbagai daerah. Pada masa awal kemerdekaan di era Presiden Soekarno, perekonomian Indonesia mengalami tiga fase utama, yaitu fase penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, fase penguatan pilar-pilar ekonomi, serta fase krisis yang menyebabkan inflasi tinggi. Pada awal pemerintahan Presiden Soekarno, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia tercatat sebesar Rp 5.523.863. Pada tahun 1961, Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen, namun pada tahun 1963 angka tersebut menurun hingga mencapai -2,24 persen. Penurunan ini disebabkan oleh tingginya biaya politik yang mengakibatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar minus Rp 1.565,5 miliar, yang kemudian memicu hiperinflasi hingga 600 persen pada tahun 1965. Meski begitu, pada tahun 1964 pertumbuhan ekonomi sempat kembali meningkat mencapai 3,53 persen, namun kembali turun menjadi 1,08 persen pada tahun 1965. Di penghujung masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1966, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 2,79 persen.

Kondisi ekonomi Indonesia di era Presiden Soeharto juga mengalami pasang surut. Presiden Soeharto merupakan Presiden Indonesia yang kedua yang paling lama memimpin Indonesia. Pada tahun 1967 yang merupakan awal Presiden Soeharto menjabat, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dengan tujuan membuka peluang yang luas bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, Presiden Soeharto juga merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang menekankan pada pencapaian swasembada, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 10,92 persen pada tahun 1970. Iklim ekonomi di Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan sekitar 6-7 persen hingga tahun 1997, yang didukung oleh fokus pembangunan pada sektor pertanian dan industri.

Kegiatan ekonomi di era Presiden Soeharto selama menjabat terpusat pada pemetintahan dan dikuasai oleh bawahan dari Presiden Soeharto sehingga kondisinya keropos. Pemerintah menguasai 70 persen perekonomian di Indonesia, sehingga tidak bisa menopang perekonomian nasional. Ketika krisis ekonomi global tahun 1998, pemerintah kehilangan pijakan karena perekonomian Indonesia bergantung kepada pemerintahan. Posisi bank Indonesia saat itu hanya untuk alat penutup defisit pemerintahan, sehingga tidak membendung gejolak moneter yang mana Indonesia mengalami krisis dan inflasi mencapai 80 persen. Pada tahun 1998, negara bilateral menarika diri untuk membantu ekonomi Indonesia karena krisis yang tidak bisa dihindari, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi -13,13 persen. Dan Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan Badan Moneter Internasional (IMF) diakibatkan utang dan IMF mensyaratkan untuk perubahan dalam kebijakan ekonomi di segala lini.

Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, ekonomi Indonesia mengalami proses pemulihan dan transisi, dengan pertumbuhan meningkat dari -13,13 persen pada tahun 1998 menjadi 0,79 persen pada tahun 1999. Presiden Habibie mengeluarkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter yang bertujuan mengembalikan Indonesia ke jalur kebangkitan ekonomi. Nilai tukar rupiah juga menguat, dari Rp16.650 per Dollar AS pada tahun 1998 menjadi sekitar Rp7.000 per Dollar AS pada November 1998. Upaya pemulihan tersebut dilanjutkan oleh Presiden ke-4 Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Presiden Gusdur menerapkan kebijakan fiskal dan otonomi daerah, termasuk pembagian dana berimbang antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan pajak dan retribusi daerah, sehingga ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,64 persen pada tahun 2001 dan meningkat menjadi 4,92 persen pada tahun 2002.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Presiden Megawati melakukan reformasi di sektor perbankan dengan menerapkan

pengawasan yang lebih ketat dan memperkenalkan penerbitan surat utang atau obligasi secara langsung. Hal ini membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih mandiri dan terarah, serta mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi baru. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,5 persen pada tahun 2002, dan meningkat menjadi 5,03 persen pada akhir masa pemerintahan Presiden Megawati di tahun 2004. Selain itu, tingkat kemiskinan di Indonesia mulai menurun secara konsisten, dari 18,4 persen pada tahun 2001 menjadi 16,7 persen pada tahun 2004.

Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), perekonomian Indonesia relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,69 persen pada tahun 2005, menurun sedikit menjadi 5,5 persen pada tahun 2006, dan kembali meningkat menjadi 6,35 persen pada tahun 2007. Pada 2008, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan tipis menjadi 6,01 persen, kemudian di akhir masa jabatan Presiden SBY turun lagi menjadi 4,63 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak krisis finansial global yang tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tetapi juga banyak negara lain. Pada tahun 2009, kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat menyebabkan harga komoditas global naik. Meski demikian, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhannya meskipun melambat dan berhasil masuk dalam tiga negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia.

Pada masa jabatan kedua Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat, mencapai 6,22 persen pada tahun 2010. Pemerintah mulai menyusun rencana percepatan pembangunan ekonomi jangka panjang dengan mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil di kisaran 5-6 persen. Pada akhir masa kepemimpinan Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03 persen. Selanjutnya, pemerintahan Presiden Jokowi melanjutkan pembangunan ekonomi dengan melakukan perubahan struktur APBN yang lebih fokus pada peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan efisiensi agar Indonesia mampu bersaing secara global. Namun, selama era Presiden Jokowi, pertumbuhan

ekonomi Indonesia cenderung berada di bawah tingkat pertumbuhan pada masa pemerintahan Presiden SBY.

Kondisi ekonomi kembali rapuh di tahun 2015, karena pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4,88 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh tidak jelasnya arah perekonomian Indonesia. Pada tahun 2008, pertumbuhan meningkat menjadi 5,17 persen yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di masa Presiden Jokowi yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Investasi menyumbang 6,01 persen, ekspor sebesar 4,33 persen, impor sebesar 7,01 persen dan konsumsi pemerintah 4,56 persen. Diakhir era Presiden Jokowi tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,02 persen dikarenakan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China sehingga menyebabkan ketidakpastian ekonomi global.

Presiden Jokowi kembali terpilih untuk memimpin Indonesia, tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan menjadi -2,06 persen karena dunia dihadapkan oleh virus Covid sehingga kondisi ekonomi mengalami penurunan. Pada tahun 2020, kegiatan ekonomi dibatasi karena wabah virus Covid, namun di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali mengalami kenaikan sebesar 3,70 persen. Kondisi ini tidak terlepas dari new normal yang diterapkan sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan walaupun ada protokol yang harus dipatuhi. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,31 persen dan tahun 2023 pada triwulan ke-3 pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 5,05 persen.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten menandakan daya tahan dan kinerja perekonomian Indonesia yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan permintaan domestik dan supply tercatat kuat pada triwulan ke-3 tahun 2023 dengan konsumsi rumah tangga sebesar 4,9 persen, ekspor sebesar 1,1 persen dan impor melemah menjadi -2,0 persen karena pelemahan ekonomi global. Dalam sektor keuangan, ditengah tekanan suku bunga yang masih sangat tinggi di Indonesia walaupun inflasi global

mereda tahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia relatif kuat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari awal kemerdekaan hingga sekarang, pertumbuhan ekonomi selalu mengalami fluktuasi naik turun, dan bisa dilihat pada zaman krisis ekonomi Indonesia di era Presiden Soeharto, Pemerintah membuat Undang-Undang terkait Penanaman Modal Asing untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia. Investasi asing memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia, karena bisa menambah modal dan juga meningkatkan perekonomian di Indonesia. Namun salah satu dampak negatif adalah pada krisis ekonomi global tahun 1998, yang mana investor akan menarik investasinya apabila Indonesia sebagai negara penerima tidak bisa menstabilkan perekonomian.

Pada era Presiden Jokowi, investasi asing yang masuk ke Indonesia cukup tinggi. Ini disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan Presiden yaitu Diplomasi ekonomi ke berbagai negara untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui model Omnibus Law, yang mana memberi harapan pada iklim yang lebih kondusif bagi investasi asing. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja mendapat berbagai pertentangan dari masyarakat karena pembentukan yang tidak transparan dan sangat menguntungkan pihak investor serta merugikan masyarakat. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan Investor masuk ke Indonesia (Sutrisno dkk, 2020).

Pada era Presiden Prabowo subianto, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi. Meskipun menghadapi tantangan, langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Dalam aksi sosial menunjukkan hasil positif bahwa adanya makan bergizi gratis, implementasinya masih dalam tahap bertahap dan memerlukan koordinasi yang lebih intensif antar lembaga terkait

1. Gambaran Umum Letak dan Kondisi Geografis Indonesia



Gambar 4. 1
Peta Indonesia

Secara astronomis, Indonesia berada di antara $6^{\circ} 04' 30''$ Lintang Utara hingga $11^{\circ} 00' 36''$ Lintang Selatan, serta dari $94^{\circ} 58' 21''$ sampai $141^{\circ} 01' 10''$ Bujur Timur, dengan garis ekuator yang melintasi wilayahnya pada garis lintang 0° . Dari segi geografis, Indonesia berbatasan di utara dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan; di selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia; di barat berbatasan dengan Samudera Hindia; serta di timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudera Pasifik. Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 1.910.931,32 km² dan terdiri atas 17.504 pulau. Titik paling barat Nusantara berada di Sabang, titik paling timur di Merauke, titik paling utara di Miangas, dan titik paling selatan di Pulau Rote. Negara ini terdiri dari 81.626 desa, 7.024 kecamatan, dan 98 kota, yang tersebar di lima pulau besar serta empat gugusan kepulauan.

Wilayah Indonesia dibatasi oleh 111 pulau terluar yang harus dijaga dan dikelola dengan cermat. Pulau-pulau tersebut digunakan sebagai titik acuan dalam penetapan garis pangkal batas wilayah negara dengan negara tetangga, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 mengenai Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Secara

geografis, Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sejak Desember 2022, Indonesia resmi memiliki 38 provinsi setelah pembentukan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Indonesia mencakup lima pulau besar dan empat gugusan kepulauan:

- a. Pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.
- b. Kepulauan Riau: Kepulauan Riau.
- c. Kepulauan Bangka Belitung: Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Pulau Jawa: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- e. Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil): Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- f. Pulau Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
- g. Pulau Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
- h. Kepulauan Maluku: Maluku dan Maluku Utara.
- i. Pulau Papua: Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

2. Kondisi Iklim

Indonesia berada di wilayah beriklim tropis yang hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan pergantian musim terjadi setiap enam bulan. Iklim di negara ini dipengaruhi oleh tiga jenis, yakni iklim laut, iklim tropis, dan iklim muson, yang terletak di belahan bumi bagian timur. Indonesia juga terbagi menjadi tiga zona waktu berbeda, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). WIB memiliki selisih waktu +7 jam terhadap Greenwich Mean Time (GMT), WITA +8 jam, dan WIT +9 jam. Zona WIT meliputi wilayah Papua, Papua Barat,

Kepulauan Maluku, dan pulau-pulau kecil sekitarnya, sementara WITA mencakup Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya (Nursyafina 2020).

3. Lambang Negara Indonesia



Gambar 4. 2
Lambang Negara Indonesia

Burung Garuda dipilih sebagai lambang negara Indonesia untuk menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan negara yang kuat, serta melambangkan kekuatan dan energi dalam pembangunan. Warna burung garuda yang keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan. Dalam gambar di atas juga menjelaskan tentang sejarah Indonesia waktu kemerdekaan NKRI yakni 17 Agustus 1945.

B. Uji Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

Pengelolaan data dibantu dengan aplikasi komputer *Statistical Product dan Service Solution* (SPSS) versi 26. Seluruh data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data runtut waktu (time series) yang mencakup periode tahun 2014 hingga 2023. Tiga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data investasi, pengeluaran pemerintah, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data penelitian mengikuti distribusi normal atau tidak. Data dikatakan

normal jika nilai signifikansi uji lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari $\alpha = 0,05$, data dianggap tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas sampel dilakukan menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Hasil Uji Normalitas

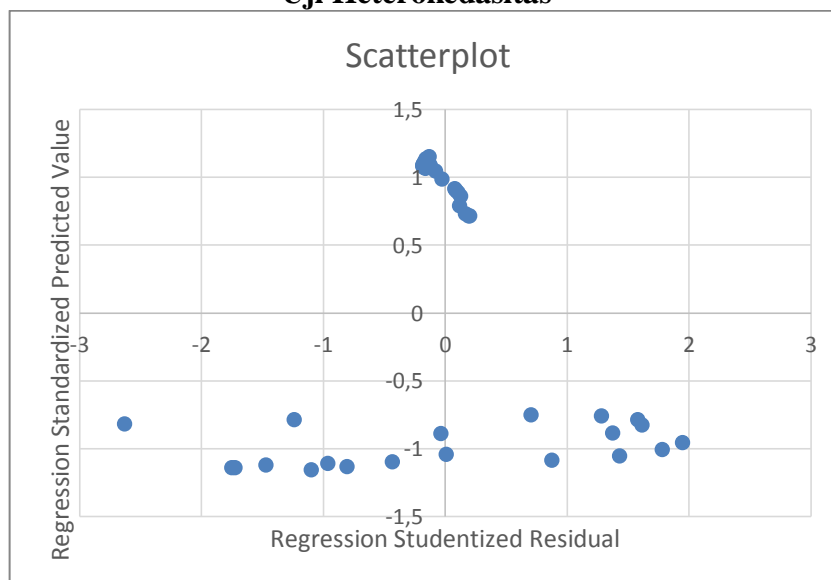
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		40	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.31507775	
	Most Extreme Differences	Absolute	.205
		Positive	.195
		Negative	-.205
Test Statistic		.205	
Exact Sig. (2-tailed)		.060	
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
<i>Sumber data : Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26, 2025</i>			

Berdasarkan Tabel 4.1, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,060 yang lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%). Oleh karena itu, model tersebut dinyatakan memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

2) Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengolahan data yang diperoleh, dapat dilihat melalui Grafik Scatterplot 4.3

Gambar 4. 3
Uji Heterokedasitas



Sumber data : Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan grafik Scatterplot pada Tabel 4.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa jika titik-titik tersebut tersebar secara acak, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat masalah multikolinieritas dalam model dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas. Hasil pengolahan data terkait hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	pengaruh investasi	.771	1.296
	pengeluaran pemerintah	.771	1.296
a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi			

Sumber data : Data Primer, diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel Investasi (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2) masing-masing sebesar 1,296, yang keduanya kurang dari 10. Sedangkan nilai tolerance untuk Investasi (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2) sama-sama sebesar 0,7, lebih besar dari 0,1. Dengan demikian, hasil uji multikolinieritas pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model.

4) Uji AutoKorelasi

Tabel 4. 3
Hasil Uji AutoKorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.292 ^a	.085	.036	13.86177	3.340
a. Predictors: (Constant), pengeluaran pemerintah, pengaruh investasi					
b. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi					

Sumber data : Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26, 2025

N	K	d _L	d _U	4 - d _L	4 - d _U	DW	Keterangan
0	2	1.390	1.600	2.610	2,400	3,40	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber: Hasil Output Eview 10, Data Diolah (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson (DW) menunjukkan nilai DW sebesar 3,340. Sementara itu, nilai 4 dikurangi batas atas (4 - d_U) adalah 2,400 dan nilai 4 dikurangi batas bawah (4 - d_L) adalah 2,610. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang berlaku, nilai DW

berada di antara $dL < DW > 4$, yaitu $1,390 < 3,340 > 4$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model tersebut.

2. Teknik analisis regresi linear berganda

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengolahan data atau estimasi yang dilakukan menggunakan program komputer SPSS 26, dengan menggunakan metode regresi linear berganda yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.985	3.224		2.787	.008
	pengaruh investasi	.360	.153	.350	2.361	.024
	pengeluaran pemerintah	-1.536	.630	-.361	-2.436	.020

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Sumber data : Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26, 2025

Pengaruh investasi = $Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + e$

$$Y = 8,985 + 0,360 X_1 + (-1,536) X_2 + e$$

Persamaan regresi diatas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Berdasarkan persamaan tersebut, konstanta memiliki nilai sebesar 8,985. Ini berarti bahwa jika variabel independen, yaitu investasi dan pengeluaran pemerintah, sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sebesar 8,985 atau 8,98%.
- 2) Koefisien investasi bernilai 0,360 dengan tanda positif, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan investasi sebesar 1% akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,360

atau 36%. Dengan kata lain, peningkatan investasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

- 3) Koefisien pengeluaran pemerintah sebesar -1,536 dengan tanda negatif, menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1% justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,536 atau 1,53%. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan dapat memberikan dampak negatif.

3. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
	.611 ^a	.373	.340	2.37682
<i>a. Predictors: (Constant), pengeluaran pemerintah, pengaruh investasi</i>				

Sumber data : Data sekunderr, diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.7, hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2014-2023 sebesar 0,373 atau 37,3%, yang ditunjukkan oleh nilai R-square (koefisien determinasi). Sementara itu, sebesar 62,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan penjelasan penelitian ini masih terbatas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji Statistik-t)

Tabel 4. 6
Uji Parsial (Uji Statistik-t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.985	3.224		2.787	.008
	pengaruh investasi	.360	.153	.350	2.361	.024
	pengeluaran pemerintah	-1.536	.630	-.361	-2.436	.020

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Sumber data : Data sekunderr, diolah dengan SPSS 26, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.8, hasil uji statistik-t pada pengujian pertama menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2014-2023, dengan nilai signifikansi $0,024 < 0,05$ dan nilai t-hitung 2,361 yang lebih besar dari t-tabel 1,685. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis alternatif (Ha1) diterima dan hipotesis nol (H01) ditolak. Pada pengujian kedua, pengeluaran pemerintah ternyata berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode yang sama, dengan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$ dan nilai t-hitung -2,436 yang lebih kecil dari t-tabel 1,685. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan pengeluaran pemerintah tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (Ha2) diterima dan hipotesis nol (H02) ditolak.

b. Uji Simultan Statistik F

Tabel 4. 7
Hasil Uji Simultan Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124.574	2	62.287	11.026	.000^b
	Residual	209.024	37	5.649		
	Total	333.598	39			
a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi						
b. Predictors: (Constant), pengeluaran pemerintah, pengaruh investasi						

Sumber data : Data Sekunder, diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2014-2023 dengan nilai signifikan sebesar $0.00 < 0.05$ atau nilai f-hitung sebesar 11.026 > f-tabel sebesar 3.24. maka, dapat dinyatakan investasi dan pengeluaran pemerintah naik maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan demikian H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

C. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan menjelaskan **“Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2014-2023”**. Berikut adalah Penjelasan tentang variabel dalam penelitian ini :

1. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Hasil penelitian ini pada pengujian pertama menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2014-2023, dengan nilai signifikansi $0,024 < 0,05$ dan nilai t-hitung 2,361 yang lebih besar dari t-tabel 1,685. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis alternatif (H_{a1}) diterima dan hipotesis nol (H_{01}) ditolak.

Menurut Teori Harrod-Domar hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi pengembangan dari analisa Keynes yang berfokus pada persyaratan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil (steady growth). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat dicapai jika terdapat keseimbangan antara pembentukan modal dan penggunaan barang-barang modal. investasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat meningkatkan stok modal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan output ekonomi. Dengan demikian, investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kemampuan produksi dan output ekonomi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2014–2023. Hal ini bertentangan dengan teori ekonomi klasik dan neoklasik yang menyatakan bahwa peningkatan investasi seharusnya berdampak langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara empiris, selama periode tersebut, tren investasi di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata menunjukkan peningkatan yang stabil setiap tahunnya. Namun, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia justru mengalami fluktuasi, bahkan mengalami perlambatan.

Ketidaksignifikanan pengaruh investasi ini dapat dijelaskan dari beberapa faktor:

- a. Kualitas investasi: Banyak investasi yang bersifat non-produktif atau tidak memberikan dampak langsung terhadap sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan.
- b. Ketimpangan wilayah: Investasi terkonsentrasi di beberapa wilayah seperti Jawa dan Sumatera, sedangkan wilayah lain masih kekurangan akses infrastruktur dan tenaga kerja yang memadai.

c. Inefisiensi birokrasi dan hambatan regulasi, yang menyebabkan realisasi investasi tidak seoptimal yang direncanakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Isthafan Najmi, A. Rahmat Adi, dan Arienal Martha Zulha yang juga menyatakan bahwa investasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

2. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Hasil pengujian ini, pengeluaran pemerintah ternyata berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode yang sama, dengan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$ dan nilai t-hitung $-2,436$ yang lebih kecil dari t-tabel $1,685$. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan pengeluaran pemerintah tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H_{a2}) diterima dan hipotesis nol (H_{02}) ditolak.

Menurut teori Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, dalam jangka pendek, output nasional dan kesempatan kerja terutama dipengaruhi oleh permintaan agregat. Para penganut teori Keynesian percaya bahwa kebijakan moneter dan fiskal perlu diterapkan untuk mengatasi masalah pengangguran serta menekan laju inflasi. Konsep Keynesian menegaskan peran penting pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perekonomian pasar dianggap kurang mampu menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dan sering kali menimbulkan ketidakstabilan, ketidakmerataan, serta ketidakefisienan. Kondisi tersebut apabila terus berlanjut akan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Murni, 2006:183). Dalam konteks Indonesia, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dengan koefisien regresi negatif sebesar $-1,5936$. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah justru berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakefisienan pengeluaran pemerintah dan penggunaan dana yang tidak

produktif. Ketidakefisienan terjadi saat pengeluaran pemerintah tidak efektif dan tidak memberikan kontribusi berarti terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran yang tidak produktif juga dapat menghambat laju pertumbuhan.

Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional, khususnya selama masa krisis. Sejak 2014, pemerintah Indonesia mengalokasikan belanja negara secara signifikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. pengeluaran pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi penopang utama perekonomian saat konsumsi dan investasi menurun. Meski pengeluaran fiskal meningkat tajam, efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh efisiensi realisasi anggaran dan kualitas proyek. Secara keseluruhan, belanja pemerintah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan permintaan agregat dan produktivitas jangka panjang.

Pengeluaran pemerintah pada periode 2014–2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama sejak dimulainya pembangunan infrastruktur berskala besar di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas energi di berbagai wilayah Indonesia memberikan dorongan terhadap sektor konstruksi dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Beberapa alasan mengapa pengeluaran pemerintah berdampak signifikan:

- a. Stimulus langsung ke sektor riil melalui belanja modal dan belanja barang.
- b. Multiplier effect, di mana belanja pemerintah mendorong peningkatan permintaan agregat.
- c. Peran fiskal aktif, terutama selama krisis pandemi, di mana belanja negara menjadi alat utama pemulihan ekonomi

Temuan ini sejalan dengan penelitian Shantika Amanda dan Asih Murwiati (2025) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah secara bersamaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2014-2023 dengan nilai signifikan sebesar $0.00 < 0.05$ atau nilai f -hitung sebesar $11.026 > f$ -tabel sebesar 3.24. maka, dapat dinyatakan investasi dan pengeluaran pemerintah naik maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan demikian H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

Pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dipahami melalui mekanisme interaksi antara sisi permintaan dan sisi penawaran dalam perekonomian. Investasi berperan sebagai penggerak dari sisi penawaran karena meningkatkan stok modal, kapasitas produksi, serta produktivitas tenaga kerja melalui teknologi dan inovasi yang diadopsi. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah berperan besar dalam mendorong sisi permintaan agregat dengan meningkatkan konsumsi publik dan menciptakan multiplier effect pada sektor-sektor ekonomi. Ketika keduanya berjalan bersamaan, efek yang dihasilkan tidak hanya bersifat aditif tetapi juga sinergis. Misalnya, jika pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur jalan, listrik, dan jaringan internet, maka hal itu menurunkan biaya logistik dan transaksi sehingga investasi menjadi lebih menarik dan produktif. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi meningkat karena terjadi peningkatan output, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat. Sinergi ini juga menciptakan crowding-in effect, yakni ketika belanja pemerintah membuka ruang bagi swasta untuk menanamkan modalnya, berbeda dengan crowding-out effect yang terjadi jika belanja pemerintah berlebihan dan menimbulkan tekanan defisit serta kenaikan suku bunga.

Lebih jauh, simultanitas keduanya dapat memperkuat pertumbuhan jangka panjang jika diarahkan ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, dan industri strategis, karena selain meningkatkan efisiensi produksi juga membentuk sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Dengan kata lain, investasi memberikan dorongan kapasitas produksi, sementara pengeluaran pemerintah memastikan bahwa kapasitas tersebut terserap secara optimal dan disertai dengan prasarana pendukung. Namun, efektivitas hubungan ini sangat dipengaruhi oleh tata kelola fiskal, stabilitas makroekonomi, dan kualitas kebijakan publik. Jika belanja pemerintah lebih banyak bersifat konsumtif atau investasi swasta terkendala birokrasi, maka efek simultan terhadap pertumbuhan menjadi lemah. Oleh karena itu, keseimbangan antara investasi produktif dan pengeluaran pemerintah yang efisien merupakan kunci agar keduanya secara simultan benar-benar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kelebihan dari pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi terletak pada sifat sinerginya yang mampu memperkuat baik sisi permintaan maupun sisi penawaran dalam perekonomian. Dari sisi kelebihan, investasi dapat mendorong akumulasi modal, modernisasi teknologi, serta menciptakan kapasitas produksi baru yang berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang. Jika pemerintah secara bersamaan meningkatkan belanja publik, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maka produktivitas investasi swasta juga akan meningkat karena biaya produksi dan distribusi menjadi lebih efisien. Selain itu, pengeluaran pemerintah dapat menciptakan multiplier effect yang memperbesar dampak investasi terhadap peningkatan output dan pendapatan nasional. Sinergi ini juga dapat menciptakan crowding-in effect, di mana belanja pemerintah justru merangsang masuknya modal swasta karena adanya kepastian pasar dan fasilitas penunjang yang lebih baik. Lebih jauh, simultanitas keduanya juga memperkuat stabilitas ekonomi dengan mengurangi ketergantungan

pada satu sumber pertumbuhan, sehingga daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal menjadi lebih baik.

Namun, terdapat pula kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, jika pengeluaran pemerintah terlalu besar tanpa mempertimbangkan kualitas dan efektivitasnya, hal ini dapat memicu defisit fiskal yang tinggi dan pembengkakan utang negara, sehingga justru menekan ruang fiskal untuk investasi produktif di masa depan. Kedua, adanya potensi crowding-out effect, yaitu kondisi ketika pembiayaan belanja pemerintah melalui pinjaman atau kenaikan pajak dapat mengurangi kemampuan sektor swasta untuk berinvestasi, misalnya karena suku bunga meningkat atau beban pajak menjadi lebih berat. Ketiga, ketidaktepatan arah investasi maupun belanja pemerintah, misalnya jika lebih banyak digunakan untuk subsidi konsumtif ketimbang pembangunan produktif, akan mengurangi efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, bila investasi swasta terhambat oleh birokrasi, korupsi, atau ketidakpastian regulasi, maka manfaat simultan antara investasi dan belanja pemerintah tidak tercapai secara optimal. Dengan demikian, meskipun kombinasi keduanya memiliki potensi besar mempercepat pertumbuhan ekonomi, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas kebijakan fiskal, keberlanjutan pengelolaan utang, serta iklim investasi yang kondusif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Riznaky Roosmanita dan Jhonny Marbun (2022) yang menunjukkan pengaruh positif investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu variabel independen Pengaruh investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Diindonesia Pada Tahun 2014-2023 mempengaruhi variabel dependen, dan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Variabel Pengaruh investasi (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi langsung (Y) di Indonesia pada tahun 2014-2023. Artinya, Semakin meningkatnya investasi maka meningkat pertumbuhan pada dengan demikian hipotesis H1 diterima.
2. Variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah (X2) memiliki signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia pada tahun 2014-2023. Artinya, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi diindonesia menurun.
3. Pengaruh investasi (X1) Pengeluaran Pemerintah {X2} memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia pada tahun 2014-2023. Artinya, setiap kenaikan terhadap pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah maka akan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi H1 diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2014-2023, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Meningkatkan Investasi pada Sektor-Sektor Produktif Pemerintah

Meningkatkan investasi pada sektor-sektor yang produktif dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Contohnya, pemerintah dapat meningkatkan investasi pada sektor infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, untuk

meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan investasi pada sektor teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing

2. Mengoptimalkan Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah juga dapat mengoptimalkan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, seperti pendidikan dan kesehatan. Contohnya, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran pada program-program pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan pengeluaran pada program-program kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi biaya kesehatan yang tidak perlu.

3. Kebijakan Fiskal yang Tepat

Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan fiskal yang tepat untuk meningkatkan investasi dan pengeluaran pemerintah yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pemerintah dapat melakukan kebijakan pajak yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui investasi dan pengeluaran pemerintah yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaruddin. “*Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio* “. Jakarta: Rineka Cipta (2004).
- Arsyad, Lincolin. 2010. “*Ekonomi Pembangunan*”. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ambok Pangiuk. 2017. “Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Studi Tahun 2012-2015).” *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 1(1):1. doi: 10.30631/iltizam.v1i1.90.
- Doni Satria Aswin Nyoman. 2022. “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 11(8):3301. doi: 10.24843/eep.2022.v11.i08.p15.
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga: Jakarta. (Monday et al., 2014). *Kemampuan menulis & berbicara akademik*. Bandung: Rizki Press.
- Eliza, Yuliana. 2015. “Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat.” *Jurnal Pekbis* 7(3):200–210.
- Firmansyah, H., Aswanto, A., Kartini, E., Syaiful, M., Wardhana, (Cand) Aditya, Pratiwi, R., Musdalifah, M., Hariyani, D. S., Ahdiyati, M., Sukmadewi, R., Nuha, M. U., & Ladjin, N. (2022). *Pengantar Ilmu Perekonomian, Investasi Dan Keuangan*. CV. Media Sains Indonesia.
- Gampito, SE, M.Si. 2016. “*Perekonomian Indonesia Dan Ekonomi Internasional*”. STAIN Batusangkar Press.
- Haryanto, Tommy Prio. 2013. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011.” *Economics Development Analysis Journal* 2(3):148–58.
- Hidayati, Amalia Nuril. 2017. “Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8(2):227–42.
- Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, and Muhammad Yasin. 2024. “Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2(3):40–47. doi: 10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898.

- Mankiw, N. G. (2016). *Principles of Economics*. 7th Edition. Cengage Learning.
- Maisaroh, Mamai, and Havid Risyanto. 2018. "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Provinsi Banten." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1(2):206. doi: 10.14421/ekbis.2017.1.2.1049.
- Murni, Asfiah (2006), *Ekonomika Makro*, Penerbit PT.Rafika Aditama, Bandung.
- Sukirno, Sadono, 2006, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Penerbit.
- Majidi, N. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*. Prisma, LP3SMangkoesebroto, Guritno.2001.Ekonomi Publik, BPFE, Yogyakarta.
- Mongkoesebroto, Guritno. 1993. " *Ekonomi Publik*". Yogyakarta: BPFE
- Pardiansyah, Elif. 2017. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8(2):337–73. doi: 10.21580/economica.2017.8.2.1920.
- Rinaldi Syahputra. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Samudra Ekonomika, 1 (2).
- Sugiyono.2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualiatatif Dan Regesi*. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno Sadono. 2015. "*Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*". Edisi Kedua. Kencana Jakarta.
- Sukirno Sadono. 2011. " *Makro Ekonomi Teori Pengantar*" . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tambunan Tulus TH. 2011. "*Perekonomian*". Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael. 2011. " *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*". Erlangga Jakarta
- The World Bank, T. W. B. (2010). *Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioner*. The World Bank Group.
- Yosie, Gunawan. 2012. "Investasi." *Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id* 110(9):1689–99.
- Zahra, Riska, and Ishak Hasan. 2014. "Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Nagan Raya."